



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jl. Mgr. Soegijopranoto 105, Telp. (0298) 595259, Fax. (0298) 593844

Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>, email : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmannirrohiim

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun anggaran 2019 kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan tahunan 2019 dan sholawat serta salam kita curahkan kepada nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya dan pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Laporan tahunan ini merupakan laporan tahun kelima sebagai implementasi Rencana Strategis 2018-2019 serta laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019 yang akan disampaikan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Ambarawa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2019, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Ambarawa, 31 Desember 2019

KETUA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA



MUR LAILAH AHMAD, SH.

NIP. 19690313.199403.2.004

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	1
1. Manajemen Aparatur Pengadilan Agama Ambarawa	1
2. Manajemen Perkara.....	2
3. Pelayanan Informasi.....	2
4. Manajemen Administrasi Umum	3
5. Manajemen Keuangan	3
6. Pengawasan	4
B. VISI DAN MISI	4
1. VISI	4
2. MISI	4
C. RENCANA STRATEGIS	5
PENYELESAIAN PERKARA	6
A. Keadaan Perkara	6
B. Penyelesaian Perkara	6
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	6
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	7
3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali	11
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....	13
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	14
C. Perkara Bagi Masyarakat Kurang Mampu	14
Posbakum.....	14
Perkara Prodeo	15
SUMBER DAYA MANUSIA.....	16

A.	Sumber Daya Manusia	16
1.	Mutasi	17
2.	Promosi	18
3.	Pensiun.....	19
4.	Diklat Sdm Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	19
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI ...		20
A.	PENGELOLAAN KEUANGAN.....	20
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	20
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	22
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	24
4.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	26
5.	Rekapitulasi Keuangan Perkara 2019.....	27
B.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	28
1.	Sarana Perkantoran	28
2.	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	31
C.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	32
	Implementasi e-court.....	32
	implementasi sipp.....	33
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....		34
D.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	34
E.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35
F.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	37
PENGAWASAN		38
A.	INTERNAL	38
B.	EVALUASI.....	39
1.	Program Penyelesaian Perkara	39
2.	Program Manajemen SDM.....	41
3.	Program Pengelolaan Website.....	41
4.	Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi.....	43
5.	Program Implementasi SIPP.....	44
6.	Program Perkara PRODEO	45

7. Pengawasan	45
PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN	46
B. REKOMENDASI	46
DAFTAR PUSTAKA	iv
LAMPIRAN	A
Data Detil Perkara	B
Sisa Perkara Tahun 2018	B
Perkara Tahun 2019	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	H
Pos Bantuan Hukum.....	M
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentang usia	Q
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa.....	Q
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	S
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi.....	S
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	T
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi	W
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	X
Daftar Revisi DIPA	Y

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	A
Data Detil Perkara	B
Sisa Perkara Tahun 2018	B
Perkara Tahun 2019	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	H
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	P
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin	P
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentangusia	Q
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa.....	Q
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	S
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi.....	S
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	S
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi	U
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	W
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	X
Daftar Revisi DIPA	Y

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Ambarawa adalah salah satu lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sebagai badan publik di sektor yudikatif, Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

1. MANAJEMEN APARATUR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA.

Jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa pada bulan Januari sebanyak 25 orang, dan pada bulan April terdapat penambahan satu personel CPNS dengan jabatan Analis SDM Aparatur, Pada bulan Mei 2019 terjadi penggantian Ketua dimana Ketua lama Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum. dimutasi sebagai Ketua di Pengadilan Agama Pariaman dan digantikan oleh Nur Lailah Ahmad, S.H dari Pengadilan Agama Wates. Selain itu, pada bulan Mei terdapat penambahan 2 Hakim yaitu Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I serta terjadi promosi 2 Hakim yaitu Dr. H. Armansyah, Lc promosi menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Pasir Pangairan dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Krui.

Pada Bulan Juni 2019 terdapat penambahan hakim sebagai wakil ketua yaitu Drs. H. Musthofa Kamal, M.H serta penambahan 2 personel Panitera Pengganti yaitu M. Nur Hasan Latief, SHI., SH, MM dan Sukarna, SHI selain itu terdapat 2 personel yang sebelumnya menjabat juru sita dipromosikan menjadi Panitera Pengganti dan dimutasi ke Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Gogod Widiyantoro, SH dan dimutasi ke Pengadilan Agama Demak yaitu Naillatussa'adah, SH.

Pada bulan September terdapat penggantian sekretaris dimana sekretaris lama yaitu Mohammad Roy Irawan, S.Kom dipromosikan menjadi Sekretaris di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A dan digantikan oleh Fenia Ariasti, S.E., M.H Kasubbag Umum & Keuangan Pengadilan Agama Semarang menjadi Sekretaris di Pengadilan Agama Ambarawa.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa sampai akhir 2019 sebanyak 27 orang, dengan rincian sebagai berikut: jumlah hakim sebanyak 5 orang, jumlah kepaniteraan sebanyak 16 orang, jumlah kesekretariatan sebanyak 6 orang. Jumlah tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara SDM yang tersedia dengan beban kerja yang cukup besar dengan volume jumlah perkara yang meningkat, maka dalam rangka memaksimalkan pengelolaan/manajerial aparatur Pengadilan Agama dengan sebaik-baiknya, maka kebijakan dengan rangkap jabatan yang tidak dapat dihindari.

2. MANAJEMEN PERKARA

Administrasi Peradilan dapat berjalan lancar, cepat serta tepat, dengan adanya peralatan teknologi sebagai sarana proses administrasi dengan mengefektifkan dan meningkatkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI yang mengacu kepada sistem kerja pola Bindalmin yang mempunyai keunggulan, diantaranya :

-) mempercepat pelayanan;
-) mudah pencarian data;
-) terintegrasi dan otomatisasi;
-) efisiensi dan efektivitas dalam penyimpanan data perkara.

3. PELAYANAN INFORMASI

- a. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ditingkatkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, meliputi pelayanan:
 -) Pembukaan Website Pengadilan Agama Ambarawa, menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui Website Pengadilan Agama Ambarawa www.pa-ambarawa.go.id dan email : sekretariat@pa-ambarawa.go.id dan pa_ambarawa20@yahoo.co.id.
 -) keterbukaan dibidang anggaran, informasi tentang panjar biaya perkara, penerimaan uang iwadl.
 -) Informasi jadwal sidang
 -) Informasi perkara yang meliputi tentang Informasi jadwal sidang, pengumuman ghoib, perkara yang masih dalam proses, diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di minutasi.
- c. Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu disediakan sarana prasarana yang memadai, berupa :
 -) Penyediaan peralatan komputer
 -) Penyediaan anggaran operasional
 -) Penyediaan petugas operator TIM TI
 -) Pelatihan petugas operator TIM TI
 -) Penunjukan TIM TI
 -) Menyediakan 1 unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi peradilan berupa Touch Screen (layar sentuh)

4. MANAJEMEN ADMINISTRASI UMUM

- a. Meningkatnya kinerja pelayan publik, terhadap masyarakat pencari keadilan dan membudayakan sikap dan perilaku yang sopan, ramah, dan bijaksana untuk mewujudkan pelayanan prima.
- b. Meningkatnya disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- c. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian dengan singkatan (SIKEP) Mahkamah Agung RI, data kepegawaian dapat di akomodasi dengan baik dan cepat dan setiap ada perubahan dalam hal kepangkatan dan lain-lain akan disesuaikan dengan data masing-masing pegawai.

5. MANAJEMEN KEUANGAN

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan dengan Sistem Keuangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), telah merealisasikan kebutuhan operasional Peradilan Agama yang nilainya

semakin meningkat. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, sehingga anggaran yang tersedia tepat sasaran dan tepat guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

6. PENGAWASAN

Untuk mengefektifkan pengawasan, maka para Hakim diberi tugas tambahan sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai Koordinator dan penanggung jawab pengawasan. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan melaksanakan pengawasan setiap bulan, membina dan menindak lanjuti hasil-hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Ketua melalui Wakil Ketua sebagai koordinator.

Dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang efektif dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama diharapkan petugas dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung".

Makna Profesional adalah seluruh aparatur Peradilan Agama Untuk mencapai sukses dalam bekerja, harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

Mandiri dalam hal ini berarti seluruh aparatur peradilan agama tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dihadapi untuk diselesaikan.

2. MISI

Visi yang telah dirumuskan oleh Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana tertulis pada Sub Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Agama Ambarawa hanya tinggal

menjalankan misi. Dengan demikian dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa tidak keluar dari pernyataan misi tersebut di atas.

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ambarawa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

BAB II

PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

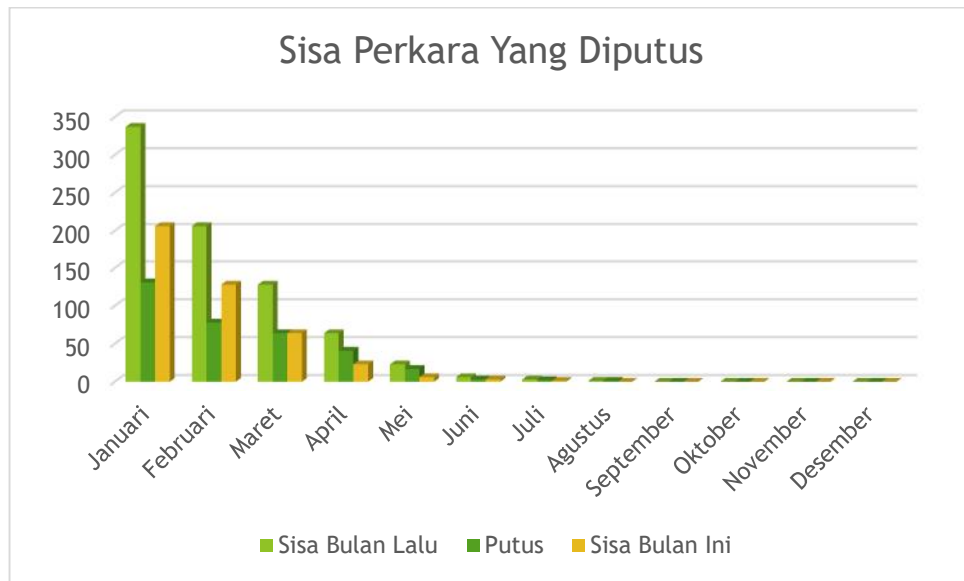
Jumlah sisa perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2018 adalah sebanyak 337 perkara, dari sisa perkara tahun 2018 tersebut jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 337 maka sisa perkara 2018 yang belum diputus pada tahun 2019 sebanyak 0 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara merupakan tunggakan perkara tahun sebelumnya yang belum diputus pada tahun 2019. Dari 337 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Bulan	Keadaan Perkara		
		Sisa Bulan Lalu	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	337	131	206
2	Februari	206	78	128
3	Maret	128	64	64
4	April	64	41	23
5	Mei	23	17	6
6	Juni	6	3	3
7	Juli	3	2	1
8	Agustus	1	1	-
9	September	-		-
10	Oktober	-		-
11	November	-		-
12	Desember	-		-



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019 dan dapat diselesaikan pada tahun yang sama.

KEADAAN PERKARA

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 sebanyak 1.600 perkara, sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 1.562 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2019 sebanyak 37 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Ambarawa selama tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sisa Tahun 2018	=	337 perkara
2) Diterima tahun 2019	=	1.600 perkara
3) Jumlah	=	1.937 perkara
4) Diputus	=	1.900 perkara
5) Sisa	=	37 perkara

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Dari Jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Ambarawa pada tahun 2019 sebanyak 1.900 perkara, yang merupakan perkara perceraian dan yang telah diterbitkan Akta Cerainya sebanyak 1.542 perkara.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 dikelompokkan sebagai berikut :

1) Poligami tidak sehat	=	- perkara
2) Krisis Akhlak	=	- perkara
3) Cemburu	=	- perkara
4) Kawin Paksa	=	3 perkara
5) Ekonomi	=	441 perkara
6) Tidak ada tanggung Jawab/Meninggalkan Salah satu pihak	=	275 perkara
7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga	=	7 perkara
8) Penganiayaan /kekejaman mental	=	- perkara
9) Dihukum	=	1 perkara
10) Cacat Biologis	=	- perkara
11) Murtad	=	8 perkara
12) Zina	=	8 perkara
13) Tidak ada Keharmonisan	=	791 perkara
14) Lain – lain	=	8 perkara

PERKARA KHUSUS YANG MENYANGKUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2019 perkara yang salah satu pihaknya atau keduanya PNS sebanyak 31 perkara dimana terdapat 24 perkara baru tahun 2019 dan 7 perkara sisa tahun 2018 yang dapat dirinci sebagai berikut :

1) Cerai talak	=	15 perkara
2) Cerai gugat	=	16 perkara
3) Ijin Poligami	=	- perkara

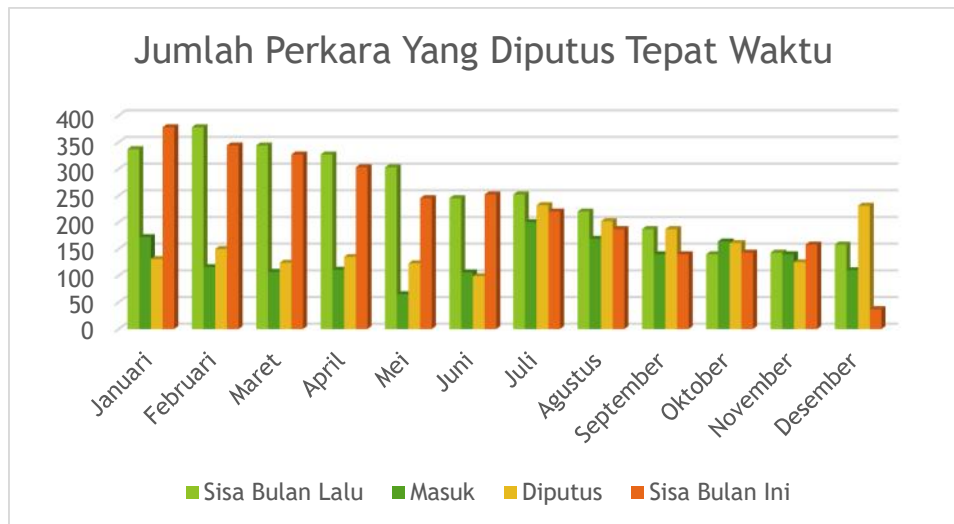
dari 31 perkara tersebut, terdiri dari :

1) Masih dalam proses	=	3 perkara
2) Selesai	=	28 perkara
3) Dicabut	=	- perkara

STATISTIK PERKARA YANG DISIDANGKAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Data perkara tingkat pertama yg ditangani oleh pada Pengadilan Agama Ambarawa untuk kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	337	172	509	131	378
2	Februari	378	116	494	150	344
3	Maret	344	107	451	124	327
4	April	327	111	438	135	303
5	Mei	303	65	368	123	245
6	Juni	245	106	351	99	252
7	Juli	252	200	452	232	220
8	Agustus	220	169	389	202	187
9	September	187	140	327	187	140
10	Oktober	140	164	304	161	143
11	November	143	140	283	125	158
12	Desember	158	110	268	231	37
TOTAL			1.600		1.900	



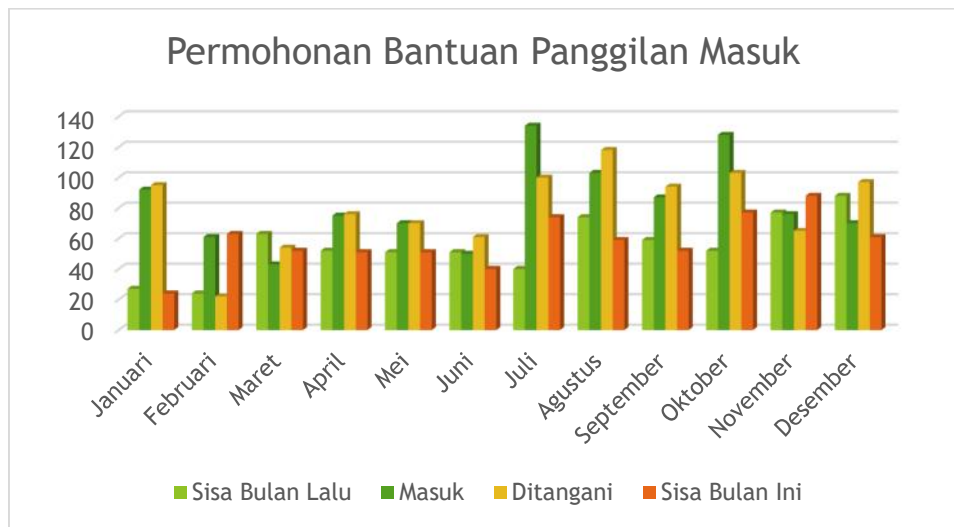
PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN

Pemohonan Bantuan Panggilan (Tabayyun) merupakan penyelesaian perkara dimana salah satu pihak yang berperkara berdomisili diluar wilayah kerja Pengadilan Agama yang menangani perkara dengan melibatkan Pengadilan Agama lain sesuai dengan domisili para pihak tersebut. Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa menangani permohonan bantuan panggilan sebanyak 1.457 perkara dimana untuk permohonan bantuan panggilan masuk sebanyak 989 perkara dan permohonan bantuan panggilan keluar sebanyak 468 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN MASUK

Data permohonan bantuan panggilan masuk pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

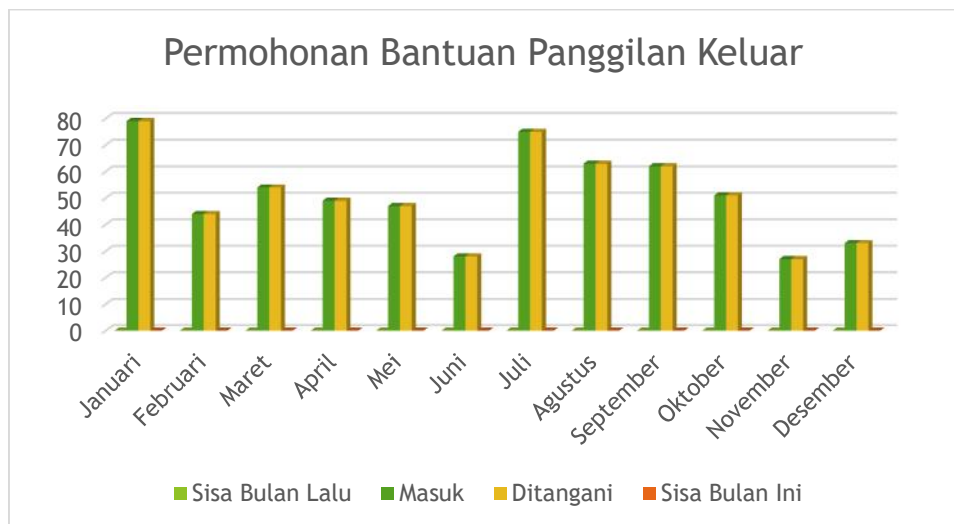
No.	Bulan	Keadaan Perkara				Sisa Bulan Ini
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	
1	Januari	27	92	119	95	24
2	Februari	24	61	85	22	63
3	Maret	63	43	106	54	52
4	April	52	75	127	76	51
5	Mei	51	70	121	70	51
6	Juni	51	50	101	61	40
7	Juli	40	134	174	100	74
8	Agustus	74	103	177	118	59
9	September	59	87	146	94	52
10	Oktober	52	128	180	103	77
11	November	77	76	153	65	88
12	Desember	88	70	158	97	61
TOTAL			989		955	



PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN KELUAR

Data permohonan bantuan panggilan keluar pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	Sisa Bulan Ini
1	Januari	-	79	79	79	-
2	Februari	-	44	44	44	-
3	Maret	-	54	54	54	-
4	April	-	49	49	49	-
5	Mei	-	47	47	47	-
6	Juni	-	28	28	28	-
7	Juli	-	75	75	75	-
8	Agustus	-	63	63	63	-
9	September	-	62	62	62	-
10	Oktober	-	51	51	51	-
11	November	-	27	27	27	-
12	Desember	-	33	33	33	-
TOTAL			612		612	

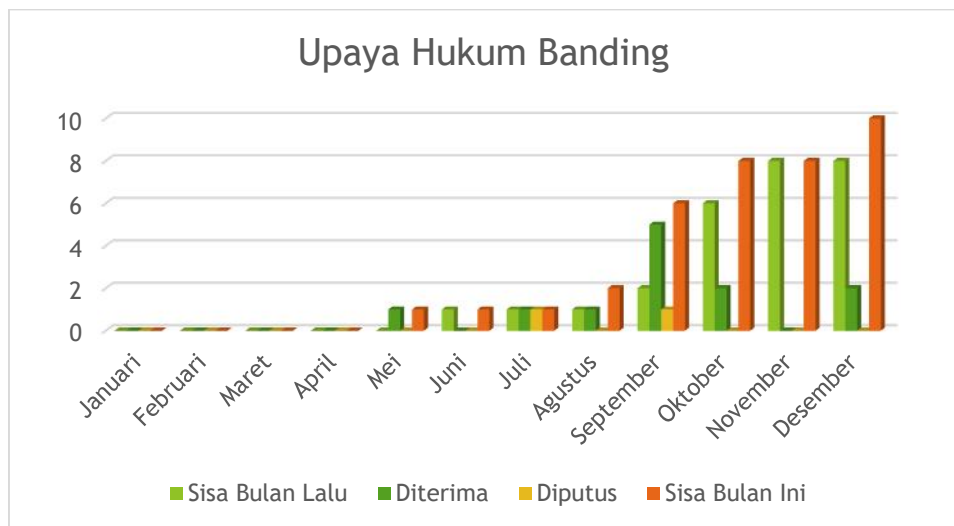


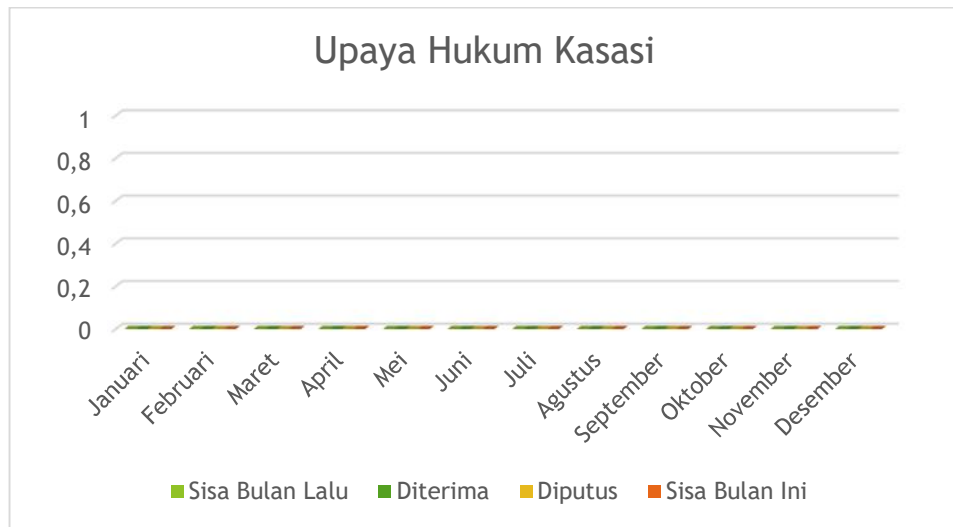
3. JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Data perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 13 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2018 dan 12 perkara baru tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 2 perkara sehingga sisa perkara Banding tahun 2019 sebanyak 11 perkara. Adapun data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 0 perkara yang terdiri dari 0 perkara tahun 2018 dan 0 perkara baru tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2019 sebanyak 0 perkara.

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 2 perkara yang terdiri dari 2 perkara tahun 2018 dan 0 perkara baru tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2019 sebanyak 2 perkara.

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu			Diterima			Diputus			Sisa Bulan Ini		
		B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
6	Juni	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Juli	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
8	Agustus	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1
9	September	2	-	1	5	-	1	1	-	-	6	-	2
10	Oktober	6	-	2	2	-	-	-	-	-	8	-	2
11	November	8	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	2
12	Desember	8	-	2	2	-	-	-	-	-	10	-	2
TOTAL					12	-	2	2	-	-			

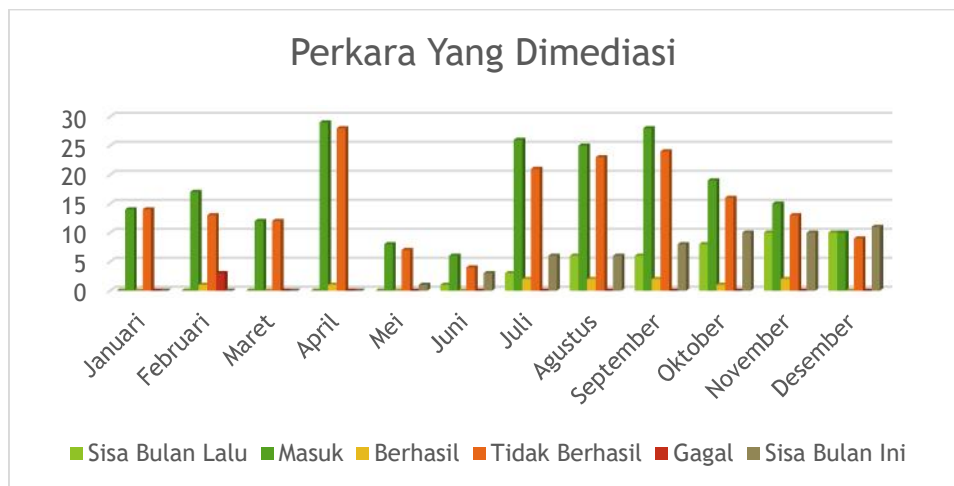




4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Data perkara yang dilakukan proses mediasi pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 209 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 11 perkara sehingga perkara yang tidak berhasil dilakukan Mediasi di tahun 2019 sebanyak 184 perkara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Perkara Yang Dimediasi					Sisa Bulan Ini
		Sisa Perkara	Masuk	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	
1	Januari	-	14	-	14	-	-
2	Februari	-	17	1	13	3	-
3	Maret	-	12	-	12	-	-
4	April	-	29	1	28	-	-
5	Mei	-	8	-	7	-	1
6	Juni	1	6	-	4	-	3
7	Juli	3	26	2	21	-	6
8	Agustus	6	25	2	23	-	6
9	September	6	28	2	24	-	8
10	Oktober	8	19	1	16	-	10
11	November	10	15	2	13	-	10
12	Desember	10	10	-	9	-	11
TOTAL			209	11		3	



5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Pengadilan Agama Ambarawa tidak terdapat perkara anak yang berhasil melalui diversi yang ditangani.

C. PERKARA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kemudian dirincikan di Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

POSBAKUM

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Jam Layanan sebesar 600 Jam Layanan dan target perkara yang

ditangani sebesar 104 Perkara. Dari alokasi anggaran dan target tersebut dapat diserap anggaran sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah jam layanan tercapai sebesar 600 jam layanan dan perkara yang dilayani sebanyak 171 Perkara dari 209 Layanan yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	3.724.000	3.724.000	13	4
3	Maret	3.724.000	3.920.000	7.644.000	23	10
4	April	7.644.000	3.724.000	11.368.000	27	18
5	Mei	11.368.000	4.116.000	15.484.000	22	18
6	Juni	15.484.000	2.940.000	18.424.000	24	24
7	Juli	18.424.000	4.098.182	22.522.182	38	37
8	Agustus	22.522.182	4.312.000	26.834.182	38	36
9	September	26.834.182	2.565.818	29.400.000	24	24
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
TOTAL			29.400.000		209	171

PERKARA PRODEO

Perkara prodeo menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Program ini merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI dalam menunjang pelaksanaan Indikator Utama yang dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran perkara Prodeo untuk 10 perkara dengan pagu anggaran per perkara sebesar Rp. 250.000,- dimana pada tahun 2019 dapat terserap sepenuhnya sebanyak 10 perkara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	Jumlah Perkara
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	1.000.000	1.000.000	4
4	April	1.000.000	750.000	1.750.000	3
5	Mei	1.750.000	250.000	2.000.000	1
6	Juni	2.000.000	-	2.000.000	-
7	Juli	2.000.000	500.000	2.500.000	2
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
TOTAL			2.500.000		10

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa berjumlah 37 orang yang terdiri dari 27 PNS/Hakim dan 10 orang tenaga honorer, adapun lebih detilnya disajikan dalam data sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Nur Lailah Ahmad, SH	Ketua	
2.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Saefudin, SH.,MH	Hakim	
4.	Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H.	Hakim	
5.	Rashif Imany, SHI., MSI	Hakim	
6.	Mun'im, SH	Panitera	
7.	Fenia Ariasti, SE., MH.	Sekretaris	
8.	Hj. Robikah Maskimayah, S.H.	Wakil Panitera	
9.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
10.	Saefudin, SH	Panitera Muda Gugatan	
11.	Mohammad Adib Fajrudin, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	
12.	Wahyu Puji Leksono	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	
13.	Aulia Ardiyansyah Suhaely, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Ade Husnul Khotimah Hasan, SE	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian	
15.	Siti Novida Subiyanti, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Arifah S. Maspeke, S. Ag.	Panitera Pengganti	
17.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Pengganti	
18.	Ana Jatmikowati, S.Pdi	Panitera Pengganti	
19.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
20.	M Nur Hasan Latief, SHI.,SH.,MM.	Panitera Pengganti	
21.	Sukarna, SHI	Panitera Pengganti	
22.	Saiful Rijal, A.Md	Jurusita	

23.	Adnani	Jurusita Pengganti	
24.	Sabar Budi Santosa	Jurusita Pengganti	
25.	Muflikh Bahaudin	Staf Pelaksana	
26.	Nur Arifah Kadir, S.Kom	Staf Pelaksana	
27.	Dicka Martyastanti, S.Psi	Staf Pelaksana	

Kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Ambarawa di tahun anggaran 2019 jika dilihat dari rasio perbandingan porsi pegawai yang ada, maka akan terlihat terdapat ketimpangan antara jumlah pegawai pada setiap bagian. Jika dilihat dari rasio jumlah perkara yang ditangani sebanyak sekitar 1.600 perkara berbanding dengan jumlah majelis hakim sebanyak 5 orang maka rata-rata setiap hakim yang menjadi ketua majelis harus menangani perkara sebanyak 380 setiap tahun atau 1,5 perkara per hari.

Untuk bagian kepaniteraan jika dilihat dari jumlah personel yang ada bisa dikatakan cukup memadai. Sedangkan bagian sekretariat masih terdapat kekurangan personil staf pada setiap sub bagian terutama pada sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta sub bagian Umum dan Keuangan.

1. MUTASI

Data mutasi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2019 terbagi menjadi Mutasi Masuk dan Mutasi keluar dengan penjelasan detil sebagai berikut:

MUTASI MASUK

Data Mutasi Masuk Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER ASAL	TMT
1.	Nur Lailah Ahmad, SH	Wakil Ketua	Ketua	PA Wates	18/05/2019
2.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Hakim	Wakil Ketua	PA Bekasi	21/06/2019
3.	Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H.	Hakim	Hakim	PA Madiun	29/05/2019
4.	Rashif Imany, SHI., MSI	Hakim	Hakim	PA Pelaihari	29/05/2019
5.	M Nur Hasan Latief, SHI.,SH.,MM.	Jurusita Pengganti	Panitera Pengganti	PA Wates	21/06/2019
6.	Sukarna, SHI	Jurusita Pengganti	Panitera Pengganti	PA Bantul	21/06/2019
7.	Dicka Martyastanti, S.Psi	-	CPNS	-	01/04/2019

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

8.	Fenia Ariasti, SE., MH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris	PA Semarang	26/09/2019
9.	Dr. H. Armansyah, Lc., MH	Hakim	Hakim	PA Kisaran	11/01/2019
10.	Asep Irpan Helmi, SH., MH	Hakim	Hakim	PA Cirebon	11/01/2019

MUTASI KELUAR

Data Mutasi Keluar Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER TUJUAN	TMT
1.	Mohammad Roy Irawan, S.Kom	Sekretaris	Sekretaris	PA Kendal	27/09/2019
2.	Gogod Widiyantoro, SH	Jurusita	Panitera Pengganti	PA Ponorogo	09/07/2019
3.	Nailatussa'adah, SH	Jurusita	Panitera Pengganti	PA Demak	28/06/2019
4.	Dr. H. Armansyah, Lc., MH	Hakim	Wakil Ketua	PA Pasir Pangairan	28/05/2019
5.	Asep Irpan Helmi, SH., MH	Hakim	Wakil Ketua	PA Krui	11/06/2019
6.	Dra. Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum	Ketua	Ketua	PA Pariaman	23/05/2019

2. PROMOSI

Data promosi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PROMOSI	TMT	KETERANGAN
1.	Ana Jatmikowati, S.PdI	Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	21/06/2019	
2.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	21/06/2019	
3.	Mohammad Roy Irawan, S.Kom	Kenaikan Kelas Pengadilan I.A	27/09/2019	
4.	Gogod Widiyantoro, SH	Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	09/07/2019	
5.	Nailatussa'adah, SH	Pengangkatan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	28/06/2019	
6.	Dr. H. Armansyah, Lc., MH	Pengangkatan Wakil Ketua	28/05/2019	

7.	Asep Irpan Helmi, SH., MH	Pengangkatan Wakil Ketua	11/06/2019	
----	------------------------------	--------------------------	------------	--

3. Pensiun

Data Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	Keterangan
1.			--- NIHIL ---	

4. Diklat SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat

Data Diklat baik SDM Teknis maupun Non Teknis Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang telah mengikuti diklat untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA DIKLAT	Keterangan
1.	Mohammad Roy Irawan	Diklat PIM III	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan bidang keuangan Pengadilan Agama Ambarawa telah menetapkan perencanaan pembelanjaan untuk menuju pencapaian target penyerapan anggaran yang maksimal. Pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama Ambarawa terbagi menjadi 3 (tiga) buah program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI serta Program Peningkatan Manajemen Peradilan. Selain 3 (tiga) program diatas, Pengadilan Agama Ambarawa juga terus berupaya memaksimalkan rencana pencapaian realisasi penerimaan anggaran melalui PNBP.

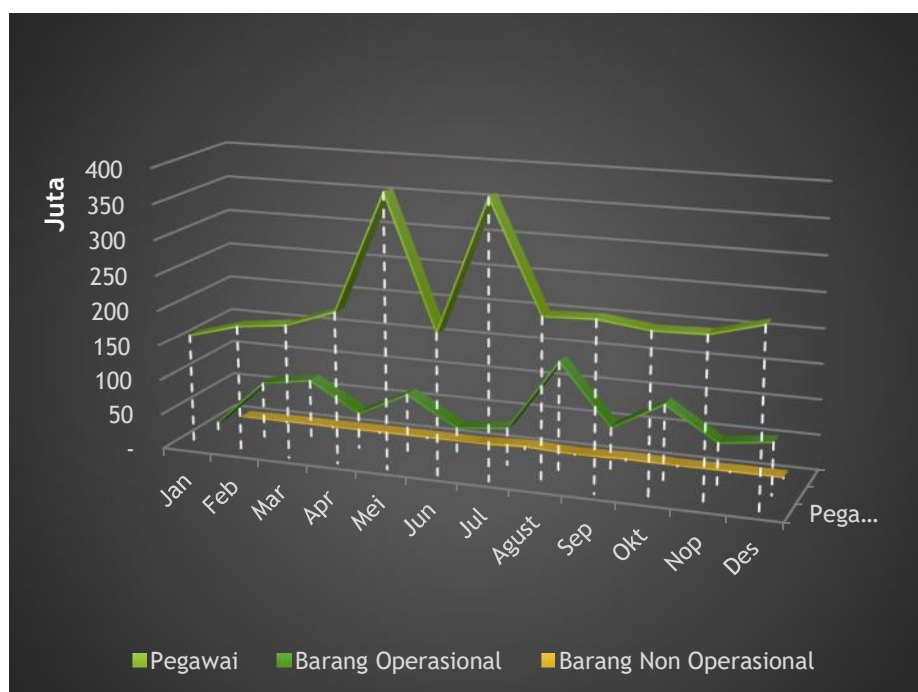
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 3.837.225.050,- dimana pada akhir tahun 2019 ini berhasil terserap sebesar Rp. 3.803.505.220,- atau sebanyak 99,12 %. Adapun rincian dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	
JANUARI	Anggaran 2019	2.920.758.000	905.067.050	11.400.000	3.837.225.050
	Realisasi	162.546.758	13.406.800	-	175.953.558
	Sisa	2.758.211.242	891.660.250	11.400.000	3.661.271.492
	Prosentase	5,57%	1,48%	0,00%	4,59%
FEBRUARI	Anggaran 2019	2.758.211.242	891.660.250	11.400.000	3.661.271.492
	Realisasi	181.855.193	79.510.226	900.000	262.265.419
	Sisa	2.576.356.049	812.150.024	10.500.000	3.399.006.073
	Prosentase	11,79%	10,27%	7,89%	11,42%

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

MARET	Anggaran 2019	2.576.356.049	812.150.024	10.500.000	3.399.006.073
	Realisasi	190.366.743	90.533.351	600.000	281.500.094
	Sisa	2.385.989.306	721.616.673	9.900.000	3.117.505.979
	Prosentase	18,31%	20,27%	13,16%	18,76%
APRIL	Anggaran 2019	2.385.989.306	721.616.673	9.900.000	3.117.505.979
	Realisasi	215.286.272	50.130.495	975.000	266.391.767
	Sisa	2.170.703.034	671.486.178	8.925.000	2.851.114.212
	Prosentase	25,68%	25,81%	21,71%	25,70%
MEI	Anggaran 2019	2.170.703.034	671.486.178	8.925.000	2.851.114.212
	Realisasi	384.598.712	85.167.251	900.000	470.665.963
	Sisa	1.786.104.322	586.318.927	8.025.000	2.380.448.249
	Prosentase	38,85%	35,22%	29,61%	37,96%
JUNI	Anggaran 2019	1.786.104.322	586.318.927	8.025.000	2.380.448.249
	Realisasi	199.659.928	44.882.800	-	244.542.728
	Sisa	1.586.444.394	541.436.127	8.025.000	2.135.905.521
	Prosentase	45,68%	40,18%	29,61%	44,34%
JULI	Anggaran 2019	1.586.444.394	541.436.127	8.025.000	2.135.905.521
	Realisasi	387.717.310	52.386.000	3.573.500	443.676.810
	Sisa	1.198.727.084	489.050.127	4.451.500	1.692.228.711
	Prosentase	58,96%	45,97%	60,95%	55,90%
AGUSTUS	Anggaran 2019	1.198.727.084	489.050.127	4.451.500	1.692.228.711
	Realisasi	235.237.374	153.809.137	150.000	389.196.511
	Sisa	963.489.710	335.240.990	4.301.500	1.303.032.200
	Prosentase	67,01%	62,96%	62,27%	66,04%
SEPTEMBER	Anggaran 2019	963.489.710	335.240.990	4.301.500	1.303.032.200
	Realisasi	238.036.374	69.068.250	2.100.000	309.204.624
	Sisa	725.453.336	266.172.740	2.201.500	993.827.576
	Prosentase	75,16%	70,59%	80,69%	74,10%
OKTOBER	Anggaran 2019	725.453.336	266.172.740	2.201.500	993.827.576
	Realisasi	229.421.974	109.373.255	375.000	339.170.229
	Sisa	496.031.362	156.799.485	1.826.500	654.657.347
	Prosentase	83,02%	82,68%	83,98%	82,94%
NOVEMBER	Anggaran 2019	496.031.362	156.799.485	1.826.500	654.657.347
	Realisasi	231.325.131	63.951.700	1.200.000	296.476.831
	Sisa	264.706.231	92.847.785	626.500	358.180.516
	Prosentase	90,94%	89,74%	94,50%	90,67%
DESEMBER	Anggaran 2019	264.706.231	92.847.785	626.500	358.180.516
	Realisasi	250.753.787	73.086.899	620.000	324.460.686
	Sisa	13.952.444	19.760.886	6.500	33.719.830
	Prosentase	99,52%	97,82%	99,94%	99,12%



2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI merupakan program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan aparaturnya Mahkamah Agung RI kepada masyarakat. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 5.476.637.000,- dimana pada akhir tahun 2019 ini berhasil terserap sebesar Rp. 5.476.622.820,- atau sebanyak 100 %. Untuk tahun 2019, program ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja modal yaitu Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perangkat Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung dan Bangunan. Adapun rincian pelaksanaan program ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Perangkat Fasilitas Perkantoran	Renovasi Gedung dan Bangunan	
JANUARI	Anggaran 2019	86.321.000	133.999.000	5.256.317.000	5.476.637.000
	Realisasi	-	-	-	-
	Sisa	86.321.000	133.999.000	5.256.317.000	5.476.637.000
	Prosentase	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FEBRUARI	Anggaran 2019	86.321.000	133.999.000	5.256.317.000	5.476.637.000
	Realisasi	-	-	22.256.220	22.256.220

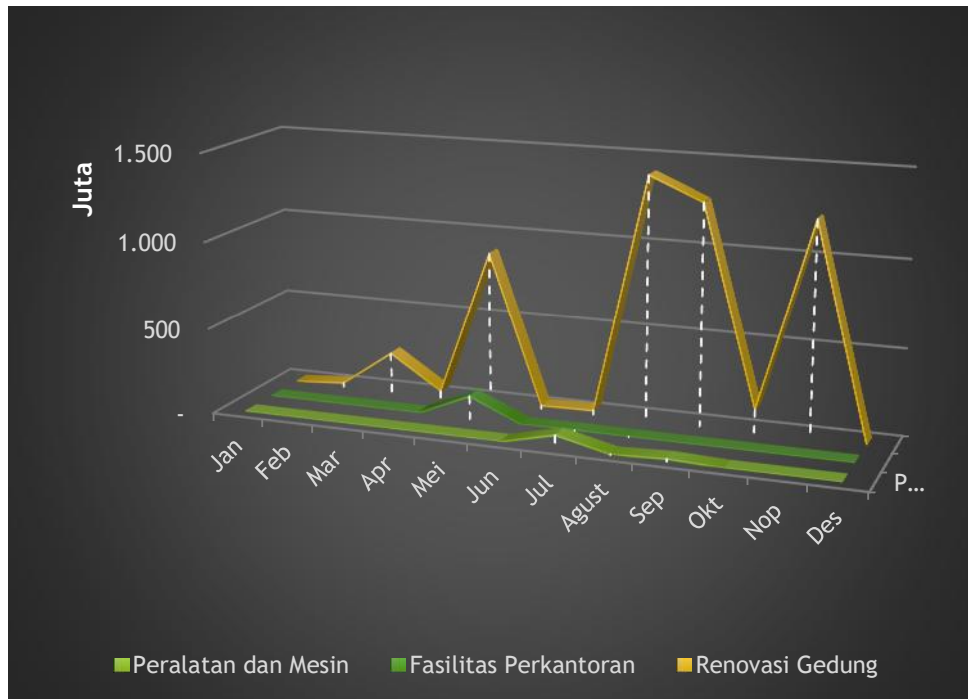
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

	Sisa	86.321.000	133.999.000	5.234.060.780	5.454.380.780
	Prosentase	0,00%	0,00%	0,42%	0,41%
MARET	Anggaran 2019	86.321.000	133.999.000	5.234.060.780	5.454.380.780
	Realisasi	-	-	235.758.100	235.758.100
	Sisa	86.321.000	133.999.000	4.998.302.680	5.218.622.680
	Prosentase	0,00%	0,00%	4,91%	4,71%
	Anggaran 2019	86.321.000	133.999.000	4.998.302.680	5.218.622.680
APRIL	Realisasi	-	-	38.629.900	38.629.900
	Sisa	86.321.000	133.999.000	4.959.672.780	5.179.992.780
	Prosentase	0,00%	0,00%	5,64%	5,42%
	Anggaran 2019	86.321.000	133.999.000	4.959.672.780	5.179.992.780
MEI	Realisasi	-	131.305.000	888.855.000	1.020.160.000
	Sisa	86.321.000	2.694.000	4.070.817.780	4.159.832.780
	Prosentase	0,00%	97,99%	22,55%	24,04%
	Anggaran 2019	86.321.000	2.694.000	4.070.817.780	4.159.832.780
JUNI	Realisasi	-	-	16.878.000	16.878.000
	Sisa	86.321.000	2.694.000	4.053.939.780	4.142.954.780
	Prosentase	0,00%	97,99%	22,87%	24,35%
	Anggaran 2019	86.321.000	2.694.000	4.053.939.780	4.142.954.780
JULI	Realisasi	72.820.000	2.300.000	21.715.800	96.835.800
	Sisa	13.501.000	394.000	4.032.223.980	4.046.118.980
	Prosentase	84,36%	99,71%	23,29%	26,12%
	Anggaran 2019	13.501.000	394.000	4.032.223.980	4.046.118.980
AGUSTUS	Realisasi	1.000.000	394.000	1.402.687.445	1.404.081.445
	Sisa	12.501.000	-	2.629.536.535	2.642.037.535
	Prosentase	85,52%	100,00%	49,97%	51,76%
	Anggaran 2019	12.501.000	-	2.629.536.535	2.642.037.535
SEPTEMBER	Realisasi	12.500.000	-	1.271.414.095	1.283.914.095
	Sisa	1.000	-	1.358.122.440	1.358.123.440
	Prosentase	100,00%	100,00%	74,16%	75,20%
	Anggaran 2019	1.000	-	1.358.122.440	1.358.123.440
OKTOBER	Realisasi	-	-	131.911.250	131.911.250
	Sisa	1.000	-	1.226.211.190	1.226.212.190
	Prosentase	100,00%	100,00%	76,67%	77,61%
	Anggaran 2019	1.000	-	1.226.211.190	1.226.212.190
NOVEMBER	Realisasi	-	-	1.226.198.010	1.226.198.010
	Sisa	1.000	-	13.180	14.180
	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Anggaran 2019	1.000	-	13.180	14.180
DESEMBER	Realisasi	-	-	-	-
	Sisa	1.000	-	13.180	14.180
	Anggaran 2019	1.000	-	13.180	14.180

	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
--	------------	---------	---------	---------	---------

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Berbeda dengan kedua program yang sudah dijabarkan diatas dimana tanggung



jawab vertikal disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, program peningkatan manajemen peradilan merupakan program yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program peningkatan manajemen Peradilan sebesar Rp. 26.500.000,- dimana pada akhir tahun 2019 ini berhasil terserap sebesar Rp. 26.450.000,- atau sebanyak 99,81 %. Program ini diberikan sebagai bentuk pelayanan langsung yang berkaitan dengan masyarakat. Penjabaran dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA PERKARA PRODEO	BELANJA POSBAKUM	TOTAL DIPA
JANUARI	Anggaran 2019	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Realisasi	-	-	-
	Sisa	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Prosentase	0,00%	0,00%	0,00%
FEBRUARI	Anggaran 2019	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Realisasi	-	750.000	750.000

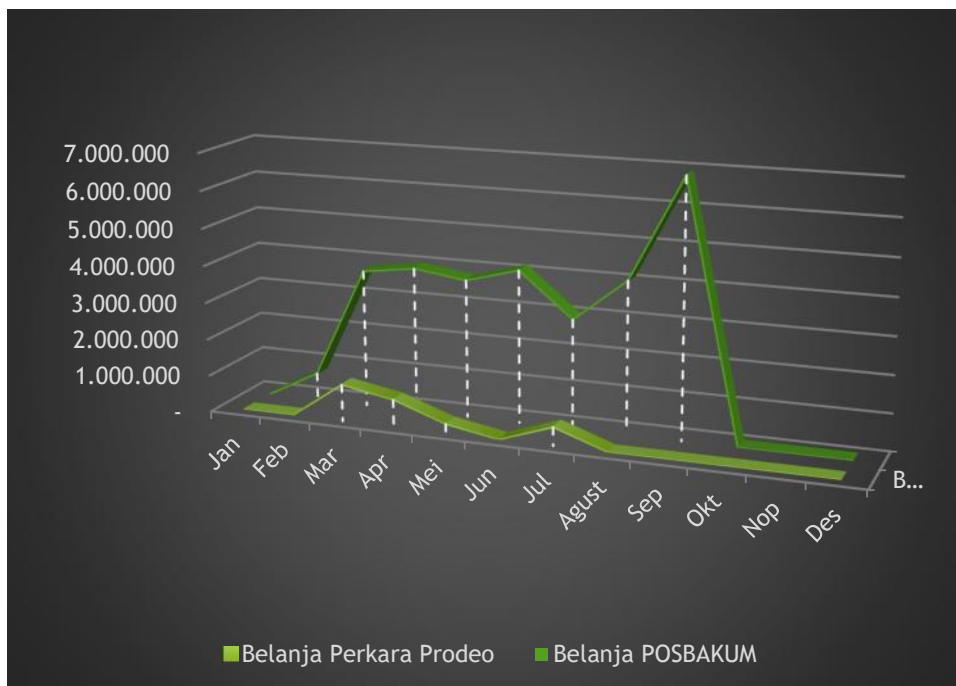
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

	Sisa	2.500.000	29.400.000	31.900.000
	Prosentase	0,00%	2,49%	2,30%
MARET	Anggaran 2019	2.500.000	29.400.000	31.900.000
	Realisasi	1.000.000	3.724.000	4.724.000
	Sisa	1.500.000	25.676.000	27.176.000
	Prosentase	40,00%	14,84%	16,77%
	Anggaran 2019	1.500.000	25.676.000	27.176.000
APRIL	Realisasi	750.000	3.920.000	4.670.000
	Sisa	750.000	21.756.000	22.506.000
	Prosentase	70,00%	27,84%	31,07%
	Anggaran 2019	750.000	21.756.000	22.506.000
MEI	Realisasi	250.000	3.724.000	3.974.000
	Sisa	500.000	18.032.000	18.532.000
	Prosentase	80,00%	40,19%	43,24%
	Anggaran 2019	500.000	18.032.000	18.532.000
JUNI	Realisasi	-	4.116.000	4.116.000
	Sisa	500.000	13.916.000	14.416.000
	Prosentase	80,00%	53,84%	55,85%
	Anggaran 2019	500.000	13.916.000	14.416.000
JULI	Realisasi	500.000	2.940.000	3.440.000
	Sisa	-	10.976.000	10.976.000
	Prosentase	100,00%	63,60%	66,38%
	Anggaran 2019	-	10.976.000	10.976.000
AGUSTUS	Realisasi	-	4.098.182	4.098.182
	Sisa	-	6.877.818	6.877.818
	Prosentase	100,00%	77,19%	78,93%
	Anggaran 2019	-	6.877.818	6.877.818
SEPTEMBER	Realisasi	-	6.877.818	6.877.818
	Sisa	-	-	-
	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%
	Anggaran 2019	-	-	-
OKTOBER	Realisasi	-	-	-
	Sisa	-	-	-
	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%
	Anggaran 2019	-	-	-
NOVEMBER	Realisasi	-	-	-
	Sisa	-	-	-
	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%
	Anggaran 2019	-	-	-
DESEMBER	Realisasi	-	-	-
	Sisa	-	-	-
	Anggaran 2019	-	-	-

	Prosentase	100,00%	100,00%	100,00%
--	------------	---------	---------	---------

4. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

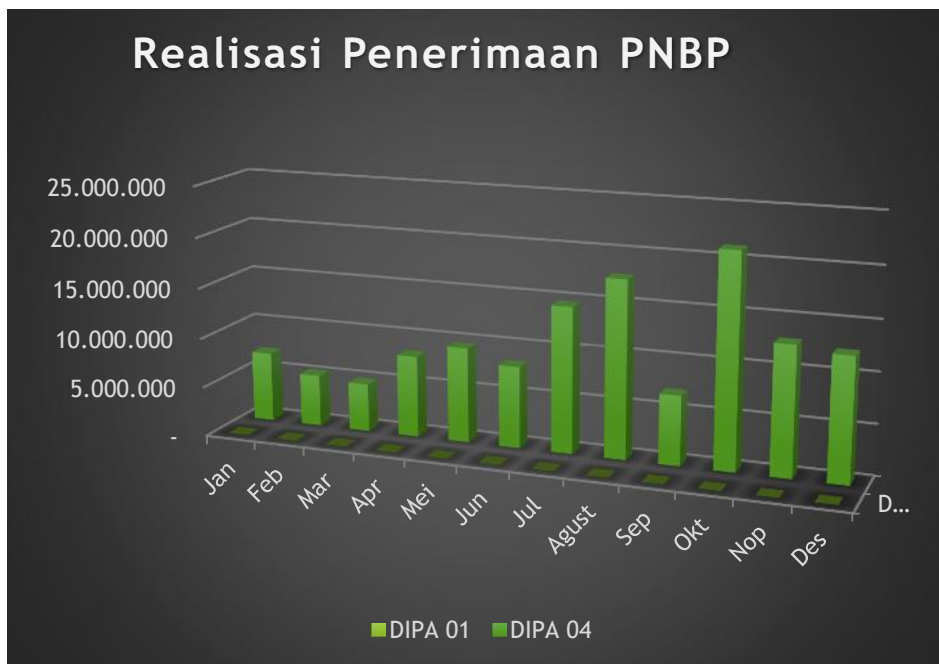
Selain pencapaian penyerapan target penyerapan anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa juga cukup berhasil dalam pencapaian rencana anggaran penerimaan negara melalui PNBP. Adapun realisasi dari PNBP Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :



BULAN	DIPA 01	DIPA 04	TOTAL PNBP
JANUARI	-	6.962.000	6.962.000
FEBRUARI	-	5.157.300	5.157.300
MARET	-	4.784.300	4.784.300
APRIL	-	8.141.000	8.141.000
MEI	-	9.501.000	9.501.000
JUNI	-	8.135.500	8.135.500
JULI	-	14.558.500	14.558.500
AGUSTUS	-	17.630.000	17.630.000
SEPTEMBER	-	6.905.000	6.905.000
OKTOBER	-	21.156.000	21.156.000
NOVEMBER	-	12.864.000	12.864.000
DESEMBER	-	12.263.500	12.263.500
JUMLAH	-	128.058.100	128.058.100

5. REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA 2019

Saldo awal keuangan perkara Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebesar Rp. 118.716.000,- Selama tahun 2019 total penerimaan pemasukan keuangan perkara yang berasal dari Panjar Biaya Perkara, Biaya Eksekusi, Biaya Konsinyasi di Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebesar Rp. 1.082.234.000,-, adapun total pengeluaran yang terdiri dari biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pengiriman, materai dan lain-lain adalah sebesar Rp. 1.107.735.000,-, sehingga saldo akhir keuangan perkara Pengadilan Agama



Ambarawa tahun 2019 sebesar Rp. 93.215.000,- dengan perincian sebagai berikut:

BULAN	SALDO AWAL	PEMASUKAN	PENGELUARAN			SALDO AKHIR
			BIAYA	PSP	TOTAL	
JANUARI	118.716.000	92.101.000	70.080.000	11.105.000	81.185.000	129.632.000
FEBRUARI	129.632.000	76.701.000	59.728.000	8.500.000	68.228.000	138.105.000
MARET	138.105.000	65.834.000	63.873.500	8.947.000	72.820.500	131.118.500
APRIL	131.118.500	80.847.000	74.109.000	12.060.000	86.169.000	125.796.500
MEI	125.796.500	48.142.000	60.359.000	10.360.000	70.719.000	103.219.500
JUNI	103.219.500	74.841.000	48.084.000	5.080.000	53.164.000	124.896.500
JULI	124.896.500	138.153.000	118.455.000	18.415.000	136.870.000	126.179.500
AGUSTUS	126.179.500	118.758.000	109.242.500	20.243.000	129.485.500	115.452.000
SEPTEMBER	115.452.000	110.633.000	98.456.000	17.427.000	115.883.000	110.202.000
OKTOBER	110.202.000	113.956.000	91.781.000	17.392.000	109.173.000	114.985.000
NOVEMBER	114.985.000	87.098.000	78.840.000	13.450.000	92.290.000	109.793.000
DESEMBER	109.793.000	75.170.000	71.651.000	20.097.000	91.748.000	93.215.000
TOTAL		1.082.234.000	944.659.000	163.076.000	1.107.735.000	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari sarana perkantoran dan sarana teknologi informasi.

1. SARANA PERKANTORAN

Sarana perkantoran Pengadilan Agama Ambarawa selengkapnya dapat dilihat pada data sebagai berikut :

KENDARAAN DINAS

Data kendaraan dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova	2006	1	-	-	
2.	Toyota Avanza	2018	1	-	-	
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Mega Pro	2005	-	1	-	
2.	Honda Supra	2007	1	-	-	
3.	Honda Supra	2007	1	-	-	

GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR

Data rumah dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	GEDUNG KANTOR					
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	
2.	Mushola	1	1	-	-	
II	RUMAH DINAS					

1.	Rumah Dinas Ketua	1	-	-	1	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1	
3.	Rumah Dinas Hakim	2	-	-	2	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	-	-	1	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	1	

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Data Inventaris Kantor yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	RUANG KANTOR					
1.	Ruang Ketua	1	1	-	-	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Ruang Hakim	1	1	-	-	
4.	Ruang Panitera	1	1	-	-	
5.	Ruang Sekretaris	1	-	1	-	
6.	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-	
7.	Ruang Sekretariat	1	1	-	-	
8.	Ruang Pelayanan	1	1	-	-	
9.	Ruang Sidang Umum	1	1	-	-	
10.	Ruang Arsip	1	1	-	-	
11.	Ruang Tunggu	1	1	-	-	
12.	Ruang Mediasi	1	-	1	-	
13.	Ruang Panitera Pengganti	1	1	-	-	
II	SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN					
1.	PC Unit	40	39	-	1	
2.	Laptop	11	10	-	1	
3.	Note book	2	2	-	-	
4.	CPU	1	1	-	-	
5.	Monitor	1	1	-	-	
6.	Printer	19	18	-	1	
7.	Scanner	1	1	-	-	
8.	Server	2	2	-	-	
9.	Router	1	1	-	-	
10.	Modem	2	2	-	-	

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2019

11.	Rak Server	1	1	-	-
12.	Alat tenis Meja	1	1	-	-
13.	Pagar Permanen	1	1	-	-
14.	PABX	1	1	-	-
15.	AC Split	12	12	-	-
16.	Kipas Angin	8	5	-	3
17.	Kompor Gas	1	1	-	-
18.	Tabung Gas	1	1	-	-
19.	Rak piring Alumunium	1	1	-	-
20.	Televisi	2	2	-	-
21.	Tape Recorder	2	2	-	-
22.	Amplifier	2	2	-	-
23.	Loudspeaker	1	1	-	-
24.	Sound System	1	1	-	-
25.	Microphone	2	2	-	-
26.	Stabilisator	8	8	-	-
27.	Alat Hiasan	3	-	-	3
28.	Lambang Garuda Pancasila	4	3	-	1
29.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	2	-	-
30.	Tiang Bendera	6	6	-	-
31.	Kaca Hias	5	4	-	1
32.	Dispenser	2	2	-	-
33.	Palu Sidang	2	2	-	-
34.	Lambang Instansi	9	8	-	1
35.	Karpet	1	1	-	-
36.	Gordyn/Kray	3	-	-	3
37.	Bracket Standing	1	1	-	-
38.	UPS	5	5	-	-
39.	Telephone	2	2	-	-
40.	Pesawat telephone	2	2	-	-
41.	Faximile	1	1	-	-
42.	Fingerprint	1	1	-	-
43.	Kursi Dorong	2	2	-	-
44.	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-
45.	Genset	1	1	-	-
46.	TV Media				
47.	Meja Kayu	55	51	-	4
48.	Kursi Besi Metal	198	168	-	30

49.	Kursi Kayu	63	42	-	21	
50.	Sice	7	7	-	-	
51.	Bangku Kayu Panjang	12	12	-	-	
52.	Meja Komputer	6	6	-	-	
53.	Meja Telepon	4	4	-	-	
54.	Meja Resepsionis	1	1	-	-	
55.	Sketsel	1	1	-	-	
56.	Pot Bunga	7	7	-	-	
57.	Partisi	4	4	-	-	
58.	Gantungan Jas	3	-	-	3	
59.	Jam Elektronik	10	10	-	-	
60.	Almari Besi	10	10	-	-	
61.	Almari Kayu	23	13	-	10	
62.	Rak Besi	14	14	-	-	
63.	Rak Kayu	7	3	-	4	
64.	Filing Cabinet Besi	14	9	-	5	
65.	Filing cabinet Kayu	1	1	-	-	
66.	Brandkas	2	2	-	-	
67.	Papan Visual/Papan Nama	10	8	-	2	
68.	White Board	6	6	-	-	
69.	Peta	1	1	-	-	
70.	Mesin Antrian	1	1	-	-	
71.	Perkakas Kantor Lainnya	5	4	-	1	
72.	Mesin Ketik Manual	10	6	-	4	
73.	Mesin Hitung Elektronik	2	1	1	-	
74.	Mesin Fotocopy	1	1	-	-	
75.	Monografi	35	35	-	-	
76.	Bahan Kartografi Lainnya	1	1	-	-	
77.	Piala	6	6	-	-	
78.	Piagam	2	2	-	-	
79.	Software Komputer	2	2	-	-	
80.	Aset Tak Berwujud	1	1	-	-	

2. KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

-) Pengajuan usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

-) Pengajuan usul Penghapusan Barang Milik Negara hilang yang sudah diselesaikan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi.

Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan baik gedung kantor utama maupun rumah dinas pegawai Pengadilan Agama Ambarawa.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Saat ini implementasi teknologi informasi adalah sebuah keharusan dalam upaya mendukung kegiatan operasional pegawai Pengadilan Agama Ambarawa. Bisa dikatakan tanpa adanya teknologi informasi maka kegiatan operasional suatu kantor tidak akan berjalan secara optimal bahkan bisa dikatakan mati. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan dalam hal dukungan Teknologi Informasi maka Pengadilan Agama Ambarawa melakukan upaya – upaya yang dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

IMPLEMENTASI E-COURT

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan yang berada dibawah MA RI salah satunya adalah Pengadilan Agama Ambarawa yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Ambarawa merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang bertempat di Kabupaten Semarang dengan jumlah 1000-2500 perkara dalam satu tahun.

Berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara peradilan secara elektronik, mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (4) undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Disamping itu, dalam Perma No. 3 tahun 2018 Pasal 22 menyebutkan ketua atau kepala pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik. Guna mendukung hal ini MA RI menyediakan fasilitas layanan administrasi perkara dipengadilan secara elektronik yang disebut Elektronik Court (*e-Court*). Saat ini, *e-Court* berlaku dan diterapkan diseluruh badan peradilan, kecuali pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Agama Ambarawa telah menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 dimana berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk menatausahakan perkara yang diterima oleh pengadilan mulai dari Pendaftaran hingga terbitnya produk pengadilan berupa Putusan. Aplikasi yang awalnya dikembangkan di lingkungan peradilan umum ini kini sudah mencapai versi 3.3.0-5 yang saat ini sudah bisa diimplementasikan di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Sebagaimana pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Ambarawa juga secara langsung melakukan implementasi aplikasi SIPP ini. Diharapkan dengan adanya implementasi SIPP secara menyeluruh maka pelayanan kepada para pencari keadilan dapat lebih cepat, professional dan transparan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Peradilan terdapat beberapa jenis Pelayanan Publik unggulan yang disajikan bagi masyarakat diantaranya Akreditasi Penjaminan Mutu, Perkara Prodeo, Pelayanan Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan sebagainya.

D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi atau pentauliahian adalah pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Adapun Penjaminan Mutu adalah Serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan Akreditasi ini merupakan pengembangan dari kegiatan Sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan guna mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan.



Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa dengan segala keterbatasan yang dimiliki alhamdulillah berhasil melakukan proses Akreditasi Penjaminan Mutu dan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Asessor Eksternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mendapat predikat A (Excellent). Hasil tersebut merupakan pondasi awal dilakukannya standarisasi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat yang diharapkan dapat terus meningkat di tahun berikutnya.

E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus

2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Ambarawa ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa,

- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

F. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mahkamah Agung (MA) meluncurkan 9 inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa.

Adapun 9 inovasi aplikasi tersebut diantaranya, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan Agama, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K), Command Center Badilag, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi PNBPN, e-Register Perkara, e-Kepastian Jadwal Sidang Perkara.

Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-Litigasi) di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal persidangan tanpa perlu penumpukan antrean.

Serta, memberikan kemudahan mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dengan aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K).

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, Pengawasan Internal dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan bulanan maupun triwulan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yaitu meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan, yaitu administrasi perkara dan administrasi persidangan;
2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan yaitu administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum;
3. Evaluasi penyelenggaraan manajemen peradilan yaitu kepemimpinan, kinerja peradilan, kedisiplinan dan pelayanan publik;

Sebagai tindak lanjut pengawasan Internal, pada Pengadilan Agama Ambarawa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Hakim Pengawas Bidang, dan dalam kurun satu tahun (tahun 2019) Hakim Pengawas bidang melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : W11-A33/191/PS/I/2019 tanggal 20 Januari 2019 terhitung mulai bulan Januari 2019 susunan Hakim pengawas bidang sebagai berikut :

DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	HAKIM PENGAWAS
1	Drs. H. Musthofa Kamal, M.H. NIP. 19670827.199403.1.002	Hakim Madya Utama / Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Rashif Imany, S.H.I, M.S.I NIP. 19851129 201101 1 005	Hakim Pratama Utama	Bidang Administrasi Kesekretariatan : Bagian Umum dan Keuangan Bagian Kepegawaian dan Ortala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3	1. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. NIP. 19680212 199403 1 007	Hakim Madya Muda	Bidang Administrasi Keperkaraan : Proses Penerimaan Perkara Surat Gugatan / Permohonan Register Perkara Keuangan Perkara
	2. Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H NIP. 19680212 199403 1 007	Hakim Madya Utama	Minutasi Bidang Keperkaraan : Arsip Perkara Laporan Perkara

Para Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya dengan bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai petunjuk setiap tiga bulan sekali hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan di bawah koordinator Wakil Ketua, akan tetapi mengingat pentingnya pengawasan intern di Pengadilan Agama Ambarawa yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, maka dipandang perlu melakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan dua bulan kedepan melakukan pembinaan dan tindak lanjut dari hasil temuannya dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa setiap tiga bulan sekali.

B. EVALUASI

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, Pengadilan Agama Ambarawa sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 maupun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2019.

Komitmen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan serta menetapkan 7 program prioritas pembaruan yang tertuang didalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011.

1. PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pasca penyatuatapan lembaga peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI pada bulan Juni 2004, perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama

ada kecenderungan meningkat. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama pada lima tahun terakhir (2014, 2015, 2016, 2018, 2019) adalah:

Tahun	Jumlah Perkara Masuk
2015	1.439
2016	1.386
2017	1.338
2018	1.430
2019	1.599

Dari data tersebut, bila dibandingkan dengan tahun 2015, perkara yang diterima tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 53 perkara atau - 3,68 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, perkara yang diterima tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 48 perkara atau -3,46 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, perkara yang diterima tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 92 perkara atau 6,87 %. Begitu juga bila dibandingkan dengan tahun 2018, perkara yang diterima tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 169 perkara atau 11,81 %.

Sementara itu bila dilihat dari sisa perkara pada lima tahun terakhir (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja pegawai dalam proses penyelesaian perkara didukung oleh sumber daya yang cukup memadai kecuali pada tahun 2018 dimana sisa perkara meningkat sebab jumlah hakim yang menangani penyelesaian perkara mengalami penurunan yang signifikan sehingga sisa perkara meningkat. Namun di tahun 2019 jumlah sisa perkara mulai menurun signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Sisa Perkara
2015	303
2016	296
2017	289
2018	337
2019	37

Kecenderungan jumlah perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama menurun, kemungkinan di samping disebabkan karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, juga disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama. Dan sisa perkara ada kecenderungan

menurun, disebabkan karena peningkatan produktivitas kinerja majelis hakim dan diimbangi dengan penambahan jumlah personil yang cukup memadai.

2. PROGRAM MANAJEMEN SDM

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang pelayanan instansi yang menuju ke Pelayanan Prima. Pengadilan Agama Ambarawa selama tahun 2019 melakukan serangkaian manajemen SDM baik dalam peningkatan SDM secara manajerial maupun mental, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rapat Pembinaan Pegawai

Pengadilan Agama Ambarawa melakukan Rapat Pembinaan setiap bulan guna melakukan evaluasi terhadap permasalahan dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut dalam bungkus permusyawaratan, ini dilakukan guna tercapainya kondisi kantor yang dinamis dan nyaman.

b. Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)

Adanya beberapa aplikasi baru yang diluncurkan pada tahun 2019 seperti aplikasi SIPP dan aplikasi SIWAS memunculkan suatu problema yaitu terkait pelaksanaan atau implementasi dari aplikasi tersebut. Terkait hal tersebut Pengadilan Agama Ambarawa berupaya untuk memaksimalkan semua elemen yang ada guna menunjang hal tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan Diklat di Tempat Kerja atau Sosialisasi yang berkesinambungan.

c. Pembinaan Hakim, Panitera, Jurusita, dan Operator IT

Seluruh Pengadilan Se-eks Karesidenan Semarang melakukan pembinaan hakim, panitera, jurusita dan operator IT guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan sharing antar Pengadilan Agama, Pembinaan ini selama tahun 2019 dibagi menjadi 2 semester dimana semester pertama pembinaan hakim, dan semester ke-2 adalah pembinaan panitera, jurusita dan operator IT. Pengadilan Agama Ambarawa berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mengirimkan pegawainya guna mendapatkan pelatihan maupun sharing dan untuk kemajuan Pengadilan Agama Ambarawa.

d. Apel Senin Pagi

Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019 secara rutin menyelenggarakan apel senin pagi setiap minggunya. Acara apel senin pagi ini biasanya diisi dengan pembinaan dan pengarahan singkat yang disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa.

3. PROGRAM PENGELOLAAN WEBSITE

Website merupakan kawal depan bagi wajah kantor di dunia virtual, sehingga bisa dikatakan bahwa website merupakan kantor kedua selain kantor utama di dunia nyata. Konten sebuah website secara tidak langsung juga menunjukkan isi dari

sebuah kantor secara keseluruhan. Memang seringkali kita tidak sadar bahwa informasi yang terdapat di dalam website itu sangatlah luas bahkan melebihi informasi yang bisa didapatkan di dunia nyata, sehingga bisa dikatakan bahwa ketersediaan suatu website merupakan suatu keharusan beserta segala informasi yang terkandung didalamnya. Pengelolaan website di lingkungan peradilan agama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pedoman, selain SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi di Pengadilan yang menghapus SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berbekal 2 (dua) peraturan tersebut Pengadilan Agama Ambarawa berupaya menyajikan informasi sesuai dengan peraturan yang terdapat didalamnya.

Di era globalisasi ini peran teknologi informasi sangatlah vital dalam kemudahan dalam mendapatkan informasi yang informatif, akurat dan efisien. Salah satunya adalah website sebagai media informasi sekaligus sebagai wajah peradilan, semua informasi baik kegiatan, laporan keuangan, inventaris, perkara, bahkan pengaduan, saran dan kritik pun disajikan dalam bentuk satu rangkaian yang dinamis dalam wadah website.

Pengadilan Agama Ambarawa selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam menyajikan informasi dengan media website ini, ditahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawamelakukan perbaikan website, diantaranya dari sisi user interface (antar muka pengguna) agar benar-benar user friendly, begitu pula dalam updating konten/isi website itu sendiri, melakukan updating informasi yang aktual.

Pembentukan TIM IT pada Pengadilan Agama Ambarawa sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam membangun sistem yang moderen, efisien, efektif dan akuntabiliti dalam penyajian laporan-laporan guna memenuhi kebutuhan pencari keadilan akan informasi maupun pihak lain yang membutuhkan informasi guna tercapainya pelayanan prima 1x24 jam. Poin-poin dalam pengelolaan website diantaranya adalah :

a. Bidang kesekretariatan

1) Keuangan

Guna tercapainya Transparansi Anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa melakukan updating dalam bidang keuangan di Pengadilan Agama Ambarawa di tahun 2019 antara lain :

a) DIPA

DIPA yang diterima Pengadilan Agama Ambarawa di masukan sebagai konten website sebagai bentuk Transparansi Anggaran selama 2019

b) LRA

Realisasi Anggaran 2019 di sajikan dalam bentuk kolom perbulan

- c) PNBP
PNBP disajikan dalam bentuk kolom sebagai bentuk transparansi anggaran.
- 2) Umum
 - a) Data Inventaris
Data inventaris barang di sajikan dalam konten website agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan dan barang yang dimiliki kantor Pengadilan Agama Ambarawa guna tercapainya Transparansi
 - b) Neraca SIMAK BMN
 - c) Persediaan
- 3) Kepegawaian
 - a) DUK
DUK Pengadilan Agama Ambarawa disajikan update setiap tahun sekali dan untuk profil pegawai di update berkala setiap ada perubahan pegawai
 - b) Statistik Pegawai
Statistik pegawai disajikan agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan pegawai Pengadilan Agama Ambarawa
- b. Bidang Kepaniteraan
 - 1. Pelayanan Perkara
Pelayanan perkara disajikan berupa konten layanan-layanan perkara seperti syarat pendaftaran, biaya perkara sehingga sangat informatif bagi para pencari keadilan
 - 2. Informasi Perkara
Informasi perkara ini bisa dalam bentuk statistik perkara, putusan, dan informasi-informasi lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun pihak lain.
- c. Lain-lain
Pengaduan Online dan bukutamu menjadi sarana kritik dan saran untuk Pengadilan Agama Ambarawa, ini sangat efektif dimana ketika para pencari keadilan segan untuk menyampaikannya secara langsung mereka bisa menyampaikannya melalui buku tamu atau surat elektronik.

4. PROGRAM PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI

Untuk memaksimalkan penerapan Meja Informasi dilingkungan peradilan agama, Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi harus

diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama. Pengadilan harus dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan secara akurat dan cepat.

Selama ini di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa sudah terdapat Meja Informasi yang merupakan pusat informasi dan pelayanan bagi publik, jadi hampir semua informasi baik informasi mengenai keperkaraan, kesekretariatan sampai pengaduan masyarakat ditampung dan ditangani di bagian meja informasi. Untuk mendukung pelayanan publik dan informasi, Pengadilan Agama Ambarawa juga menyediakan sebuah komputer sentral berbasis sentuhan (KIOSK) dimana pada komputer tersebut bisa menampilkan informasi perkara secara realtime baik keadaan perkara, jadwal sidang, sampai keuangan perkara bagi para pencari keadilan. Selain itu juga terdapat sebuah Media Center berupa Televisi yang menayangkan jadwal sidang dan perkara yang diputus pada hari tersebut.

Selain hal tersebut diatas, dengan diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) maka semakin memantapkan Pengadilan Agama Ambarawa dalam pemberian layanan informasi secara profesional, sebab masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlindungi hak-haknya dalam mendapatkan informasi sesuai dengan koridor yang berlaku.

5. PROGRAM IMPLEMENTASI SIPP

Untuk memanfaatkan teknologi informasi pada proses administrasi peradilan di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Ambarawa telah memanfaatkan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerapan sekaligus otomatisasi Pola Bindalmin di lingkungan peradilan agama. Sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management system), program aplikasi ini sangat bermanfaat di bidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan. Ia juga bermanfaat mengatasi persoalan peningkatan perkara yang tidak berbanding lurus dengan tersedianya tenaga pelaksana administrasi perkara.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi aplikasi SIPP di lingkungan peradilan agama, antara lain komitmen pimpinan/kebijakan, kualitas SDM, infrastruktur, dan anggaran pemeliharaan. Dari mulai aplikasi SIPP ini dilahirkan, Pengadilan Agama Ambarawa terus berupaya meningkatkan fungsi dan kegunaan aplikasi tersebut di segala lini bidang administrasi kepaniteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi SIPP mulai dari proses Pendaftaran Perkara sampai dengan Penerbitan Akta Cerai. Selain itu dilihat dari validitas data yang dihasilkan, apabila dilihat dari portal yang khusus menangani data SIPP yaitu

sipp.mahkamahagung.go.id, prosentase update dan validitas data Pengadilan Agama Ambarawa hampir selalu diatas 75 %.

6. PROGRAM PERKARA PRODEO

Perkara Prodeo merupakan salah satu dari Program Justice For All yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dimana program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada Pihak Berperkara yang masuk kategori tidak mampu atau berperkara secara Cuma-Cuma. Pada pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Agama Ambarawa selalu mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo.

7. PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengawasan meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum. Selama tahun 2019 tidak ada pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang mendapatkan sanksi Disiplin baik yang sifatnya ringan maupun berat. Selain itu untuk proses pengawasan internal selalu dilakukan dengan melakukan pembinaan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Pimpinan atau secara berkala yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sehingga alur kerja dan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Ambarawa selalu terjaga.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2019 yakni sebesar **89,02** % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun lebih sedikit dari sisa perkara tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan telah dilaksanakan baik.
6. Pengadilan Agama Ambarawa merasakan sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat.

B. REKOMENDASI

1. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.
2. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal terkait sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensip kepada unsur Pejabat Pengadilan Agama Ambarawa agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan penyelesaian perkara sampai 100 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Ambarawa baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika

pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia.

Demikian Laporan tahunan tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 2019 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin

Ambarawa, 31 Desember 2019

Ketua
Pengadilan Agama Ambarawa



Nur Lailah Ahmad, SH.
NIP. 19690313.199403.2.004

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun Laporan Tahunan. 2018. Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Ambarawa. Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

Tim Penyusun LkjIP 2018. 2019. LkjIP 2018 Pengadilan Agama Ambarawa. Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa. 2019. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Agama Ambarawa . Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

LAMPIRAN

KEPANITERAAN

DATA DETIL PERKARA

SISA PERKARA TAHUN 2018

KEADAAN PERKARA

Dari 337 sisa perkara tahun 2018 tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	3 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	97 perkara
7) Cerai Gugat	=	223 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	- perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	3 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	3 perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	1 perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	2 perkara
18) Asal usul anak	=	- perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	- perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	- perkara

23) Wali adlol	=	- perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	- perkara
25) Kewarisan	=	- perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	- perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	- perkara
31) lain-lain	=	2 perkara
32) Ditolak	=	- perkara
33) Tidak diterima	=	- perkara
34) Gugur	=	- perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	- perkara
36) Dicabut	=	- perkara

PENYELESAIAN PERKARA

Dari 1.900 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2019, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	5 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	478 perkara
7) Cerai Gugat	=	1.104 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	1 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	9 perkara

15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	5 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	5 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	116 perkara
23) Wali adlol	=	5 perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	1 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	1 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	1 perkara
31) lain-lain	=	46 perkara
32) Ditolak	=	5 perkara
33) Tidak diterima	=	5 perkara
34) Gugur	=	14 perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	19 perkara
36) Dicabut	=	75 perkara

PERKARA TAHUN 2019

KEADAAN PERKARA

Dari 1.600 perkara yang diterima pada tahun 2019 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	5 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara

6) Cerai Talak	=	435 perkara
7) Cerai Gugat	=	958 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	1 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	8 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	6 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	6 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	118 perkara
23) Ekonomi Syari'ah	=	1 perkara
24) Wali adlol	=	3 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	3 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh/ Zakat / infaq	=	- perkara
30) P3HP / Penetapan Ahli waris	=	1 perkara
31) lain-lain	=	50 perkara
32) Pengangkatan Anak	=	- perkara

PENYELESAIAN PERKARA

Adapun 1.900 perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2019, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	5 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	478 perkara
7) Cerai Gugat	=	1.104 perkara
8) Harta Bersama	=	3 perkara
9) Penguasaan Anak	=	1 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	9 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	5 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	5 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	116 perkara
23) Wali adlol	=	5 perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	1 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	1 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara

30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	1 perkara
31) lain-lain	=	46 perkara
32) Ditolak	=	5 perkara
33) Tidak diterima	=	5 perkara
34) Gugur	=	14 perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	19 perkara
36) Dicabut	=	75 perkara
37) Pengangkatan Anak	=	- perkara

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Perkara yang disidangkan Pengadilan Agama Ambarawa sebanyak 1600 perkara. Adapun dari segi produktivitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dan gugatan selama tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis : Nur Lailah Ahmad, SH
Hakim Anggota : 1. Drs. H. Musthofa Kamal, MH
: 2. Rashif Imany, S.HI, M.SI

Perkara yang ditangani 167 perkara dan diselesaikan 166 perkara, sisa 1 perkara.

- b. Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Kamal, MH
Hakim Anggota : 1. Siti Khoiriyah, S.HI, MH.
: 2. Rashif Imany, S.HI, M.SI

Perkara yang ditangani 218 dan diselesaikan 214 perkara, sisa 4 perkara.

- c. Ketua Majelis : Drs. H. Saefudin, SH., MH.
Hakim Anggota : 1. Siti Khoiriyah, S.HI, MH.
: 2. Rashif Imany, S.HI, M.SI

Perkara yang ditangani 494 perkara dan diselesaikan 480 perkara, sisa 14 perkara.

- d. Ketua Majelis : Rashif Imany, S.HI, M.SI
Hakim Anggota : 1. Drs. H. Saefudin, SH., MH.
: 2. Siti Khoiriyah, S.HI, MH.

Perkara yang ditangani 261 perkara dan diselesaikan 253 perkara, sisa 8 perkara.

- e. Ketua Majelis : Siti Khoiriyah, S.HI, MH.
Hakim Anggota : 1. Drs. H. Saefudin, SH., MH.

: 2. Rashif Imany, S.HI, M.SI.

Perkara yang ditangani 460 perkara dan diselesaikan 450 perkara, sisa 10 perkara.

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 1 putusan yang dikuatkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Tanggal Putus
1.	1147/Pdt.G/2018/PA.Amb	190/Pdt.G/2019/PTA.Smg	17-07-2019

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 2 putusan yang dibatalkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Keterangan
1.	0030/Pdt.G/2019/PA.Amb	347/Pdt.G/2019/PTA.Smg	Tidak Memenuhi Syarat
2.	0840/Pdt.G/2019/PA.Amb	376/Pdt.G/2019/PTA.Smg	Tidak Memenuhi Syarat

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. BANDING

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 1 putusan pengadilan TK i yang tidak dapat diterima oleh Tk. Banding.

No	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Tanggal Putus
1.	0415/Pdt.G/2019/PA.Amb	368/Pdt.G/2019/PTA.Smg	16-12-2019

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIAJUKAN KE TK. BANDING TETAPI BELUM DIPUTUS

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding tidak ada putusan pengadilan tingkat I yang diajukan ke tingkat Banding tetapi belum diputus.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DICABUT

Dari 13 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 1 perkara yang dicabut. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara Tk. I	Tanggal Dicabut
1.	0096/Pdt.G/2019/PA.Amb	

PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI

Data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 1 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2018 dan 0 perkara baru tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2019 sebanyak 1 perkara.

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. KASASI.

Tidak ada perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Kasasi.

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.

Tidak ada perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan di tingkat kasasi dengan data sebagai berikut :

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima di tingkat kasasi dengan data sebagai berikut :

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DITOLAK TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak di tingkat Kasasi.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS DI TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi.

F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di tingkat Kasasi.

G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di tingkat Kasasi.

H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama adalah sebanyak 2 perkara.

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dibatalkan tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Peninjauan Kembali.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

I. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

J. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

K. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang **Berkekuatan** Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

L. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada **Pengadilan** Agama Ambarawa terdapat putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

M. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

N. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

O. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

P. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

Q. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

R. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

S. PUTUSAN KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG BELUM DIPUTUS TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat 1 putusan Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang belum diputus Tk. Peninjauan Kembali dengan data sebagai berikut :

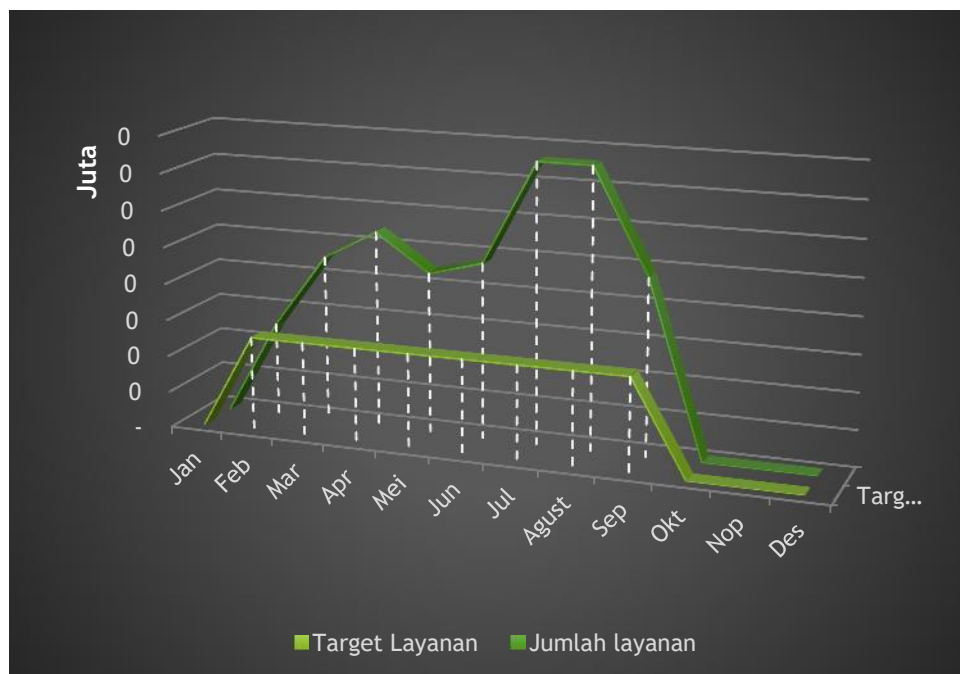
No	Nomor Perkara Tk. I
1.	0361/Pdt.G/2016/PA.Amb

POS BANTUAN HUKUM

Data pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	Bulan	REALISASI PELAKSANAAN POSBAKUM				ANGGARAN DIPA
		Jam Layanan	Target Jumlah Layanan	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	76	13	13	4	3.724.000
3	Maret	80	13	23	10	3.920.000
4	April	76	13	27	18	3.724.000
5	Mei	84	13	22	18	4.116.000
6	Juni	60	13	24	24	2.940.000
7	Juli	84	13	38	37	4.098.182
8	Agustus	88	13	38	36	4.312.000
9	September	52	13	24	24	2.565.818
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-

TOTAL	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---



SEKRETARIAT

KEGIATAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JML
		SD	SLTP	SLTA	SM	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KETUA	-	-	-	-	1	-	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	1	-	1
3	HAKIM	-	-	-	-	-	3	-	3
4	PANITERA	-	-	-	-	1	-	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	1	-	1
6	WAKIL PANITERA	-	-	-	-	1	-	-	1
7	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	1	-	-	1
8	PANMUD GUGATAN	-	-	-	-	1	-	-	1
9	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	1	-	-	1
10	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	4	2	1	7
11	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	1
12	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	1	-	-	1
13	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	1
14	JURUSITA	-	-	-	1	-	-	-	1
15	JURUSITA PENGGANTI	-	-	2	-	-	-	-	2
16	STAF	-	-	1	-	2	-	-	3
JUMLAH		-	-	3	1	15	7	1	27
		27							

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

NO	JABATAN	GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JML
1	2	7	12	17	22	23
1	KETUA	-	-	-	1	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	1	1
3	HAKIM	-	-	2	1	3
4	PANITERA	-	-	-	1	1
5	SEKRETARIS	-	-	1	-	1
6	WAKIL PANITERA	-	-	1	-	1
7	PANMUD HUKUM	-	-	1	-	1
8	PANMUD GUGATAN	-	-	1	-	1
9	PANMUD PERMOHONAN	-	-	1	-	1
10	PANITERA PENGGANTI	-	-	6	1	7
11	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	1	-	1
12	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	1	-	1
13	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	1	-	1
14	JURUSITA	-	1	-	-	1
15	JURUSITA PENGGANTI	-	2	-	-	2
16	STAF	-	-	3	-	3
JUMLAH		-	3	19	5	27

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JABATAN	GOLONGAN		
		L	P	JML
1	2	7	12	23
1	KETUA	-	1	1
2	WAKIL KETUA	1	-	1
3	HAKIM	2	1	3
4	PANITERA	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	1	1
6	WAKIL PANITERA	-	1	1
7	PANMUD HUKUM	-	1	1
8	PANMUD GUGATAN	1	-	1
9	PANMUD PERMOHONAN	1	-	1
10	PANITERA PENGGANTI	4	3	7
11	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	1	-	1
12	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	1	1
13	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	1	-	1
14	JURUSITA	1	-	1
15	JURUSITA PENGGANTI	2	-	2
16	STAF	1	2	3
JUMLAH		16	11	27

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA

NO	JABATAN	GOLONGAN								JML
		<25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>56	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	HAKIM	-	1	-	1	-	-	1	-	3
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	WAKIL PANITERA	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	PANMUD GUGATAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10	PANITERA PENGGANTI	-	2	3	2	-	-	-	-	7
11	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	1	-	-	-	-	-	-	1
12	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14	JURUSITA	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	-	1	1	-	2
16	STAF	-	1	1	-	-	-	1	-	3
JUMLAH		-	5	4	6	1	2	8	1	27
27										

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebanyak 24 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

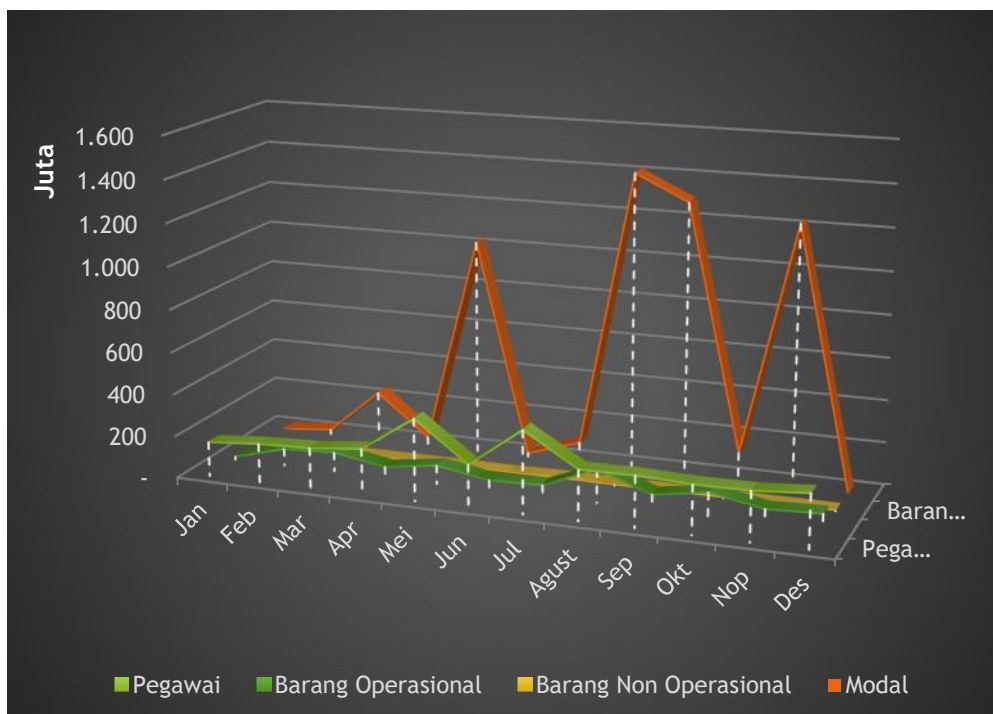
NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Nur Lailah Ahmad, SH	Ketua	
2.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Saefudin, SH.,MH	Hakim	
4.	Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H.	Hakim	
5.	Rashif Imany, SHI., MSI	Hakim	
6.	Mun'im, SH	Panitera	
7.	Fenia Ariasti, SE., MH.	Sekretaris	
8.	Hj. Robikah Maskimayah, S.H.	Wakil Panitera	
9.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
10.	Saefudin, SH	Panitera Muda Gugatan	
11.	Mohammad Adib Fajrudin, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	

12.	Wahyu Puji Leksono	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	
13.	Aulia Ardiyansyah Suhaely, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
14.	Ade Husnul Khotimah Hasan, SE	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian	
15.	Siti Novida Subiyanti, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Arifah S. Maspeke, S. Ag.	Panitera Pengganti	
17.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Pengganti	
18.	Ana Jatmikowati, S.PdI	Panitera Pengganti	
19.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
20.	M Nur Hasan Latief, SHI,SH.,MM.	Panitera Pengganti	
21.	Sukarna, SHI	Panitera Pengganti	
22.	Saiful Rijal, A.Md	Jurusita	
23.	Adnani	Jurusita Pengganti	
24.	Sabar Budi Santosa	Jurusita Pengganti	
25.	Muflikh Bahaudin	Staf Pelaksana	
26.	Nur Arifah Kadir, S.Kom	Staf Pelaksana	
27.	Dicka Martyastanti, S.Psi	Staf Pelaksana	

KEGIATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	REALISASI BELANJA				TOTAL DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	MODAL	
1	Januari	162.546.758	13.406.800	-	-	175.953.558
2	Februari	181.855.193	79.510.226	900.000	22.256.220	284.521.639
3	Maret	190.366.743	90.533.351	600.000	235.758.100	517.258.194
4	April	215.286.272	50.130.495	975.000	38.629.900	305.021.667
5	Mei	384.598.712	85.167.251	900.000	1.020.160.000	1.490.825.963
6	Juni	199.659.928	44.882.800	-	16.878.000	261.420.728
7	Juli	387.717.310	52.386.000	3.573.500	96.835.800	540.512.610
8	Agustus	235.237.374	153.809.137	150.000	1.404.081.445	1.793.277.956
9	September	238.036.374	69.068.250	2.100.000	1.283.914.095	1.593.118.719
10	Oktober	229.421.974	109.373.255	375.000	131.911.250	471.081.479
11	November	231.325.131	63.951.700	1.200.000	1.226.198.010	1.522.674.841
12	Desember	250.753.787	73.086.899	620.000	-	324.460.686



REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

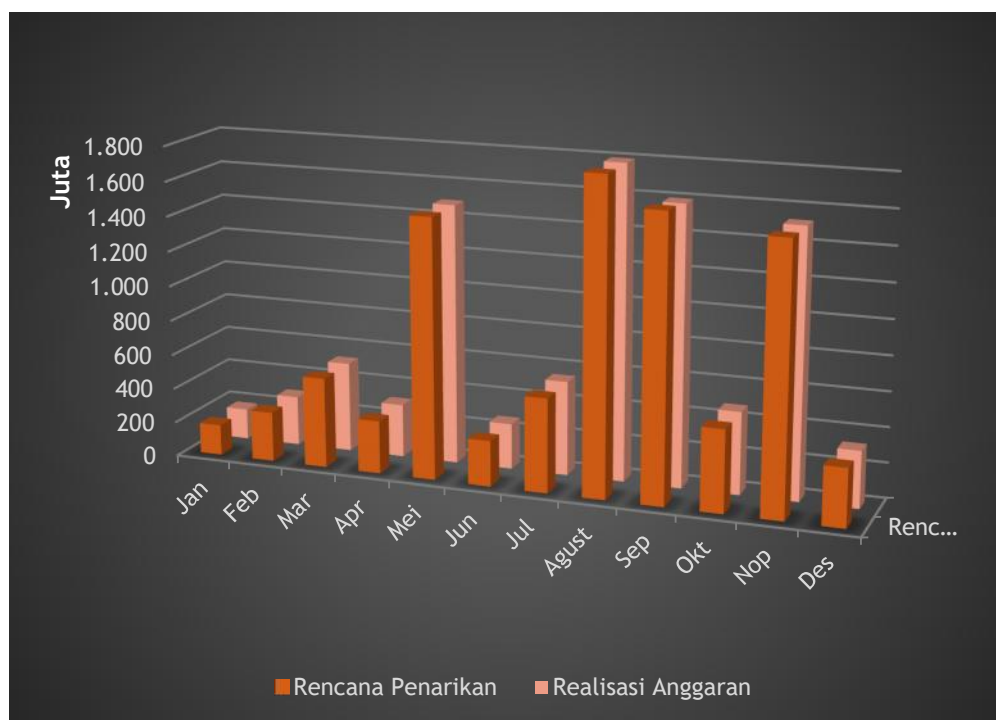
NO	Bulan	REALISASI BELANJA	TOTAL DIPA
1	Januari	-	-
2	Februari	750.000	750.000
3	Maret	4.724.000	4.724.000
4	April	4.670.000	4.670.000
5	Mei	3.974.000	3.974.000
6	Juni	4.116.000	4.116.000
7	Juli	3.440.000	3.440.000
8	Agustus	4.098.182	4.098.182
9	September	6.877.818	6.877.818
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-



KEGIATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

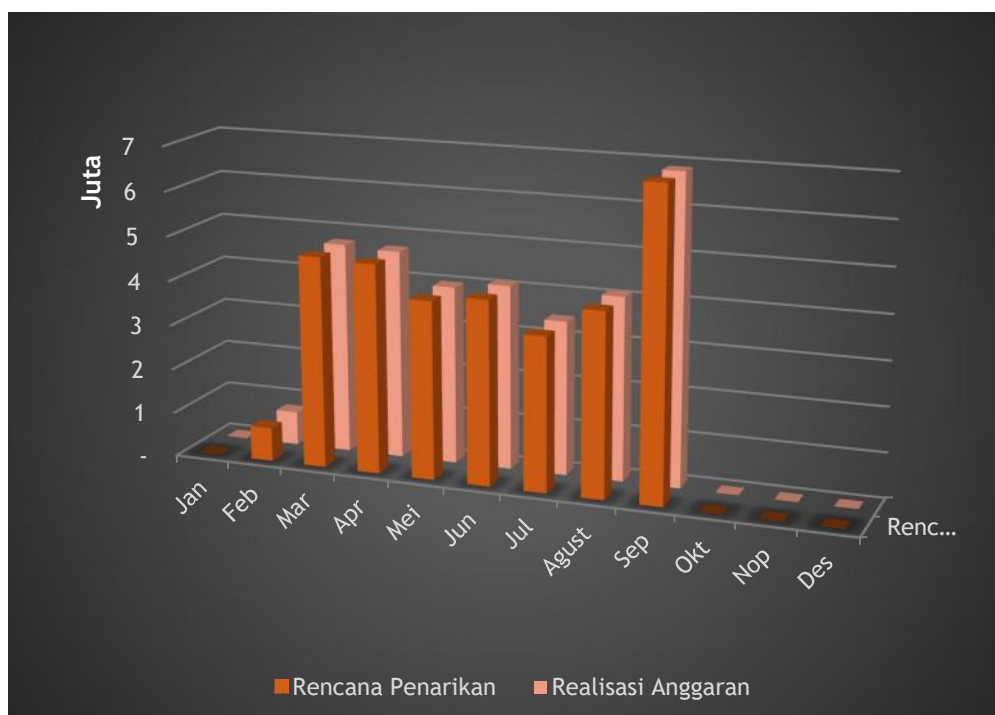
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	175.954.000	175.953.558
2	Februari	284.524.000	284.521.639
3	Maret	517.260.000	517.258.194
4	April	304.048.000	305.021.667
5	Mei	1.489.877.000	1.490.825.963
6	Juni	261.421.000	261.420.728
7	Juli	538.214.000	540.512.610
8	Agustus	1.793.280.000	1.793.277.956
9	September	1.619.915.000	1.593.118.719
10	Oktober	471.055.000	471.081.479
11	November	1.525.866.000	1.522.674.841
12	Desember	332.448.000	324.460.686



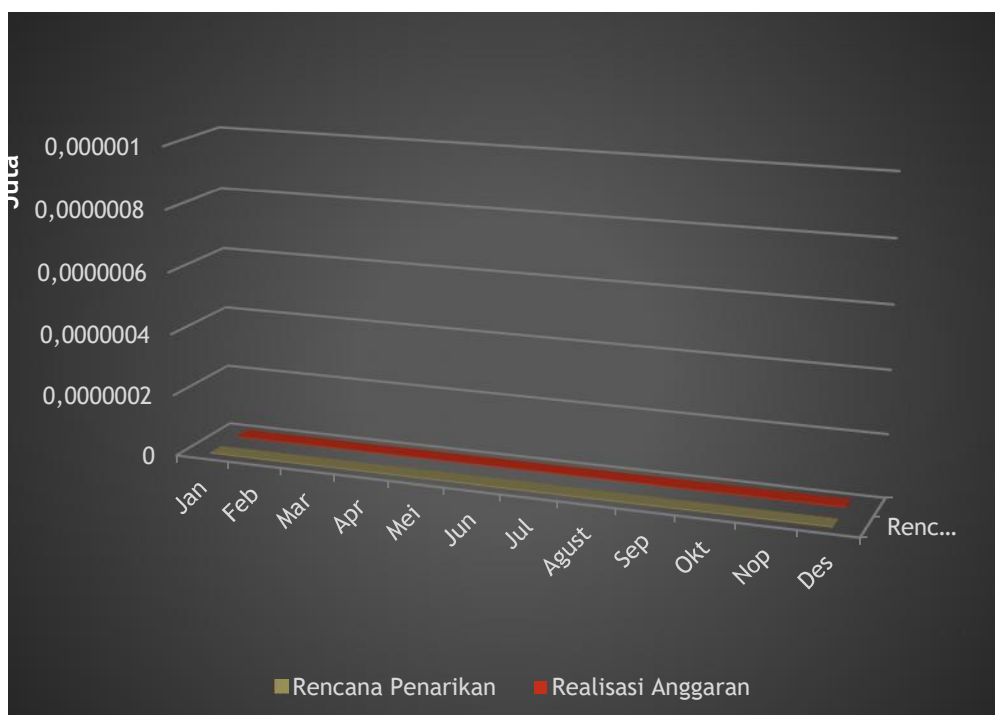
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	-	-
2	Februari	750.000	750.000
3	Maret	4.724.000	4.724.000
4	April	4.670.000	4.670.000
5	Mei	3.974.000	3.974.000
6	Juni	4.116.000	4.116.000
7	Juli	3.440.000	3.440.000
8	Agustus	4.098.000	4.098.182
9	September	6.878.000	6.877.818
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-



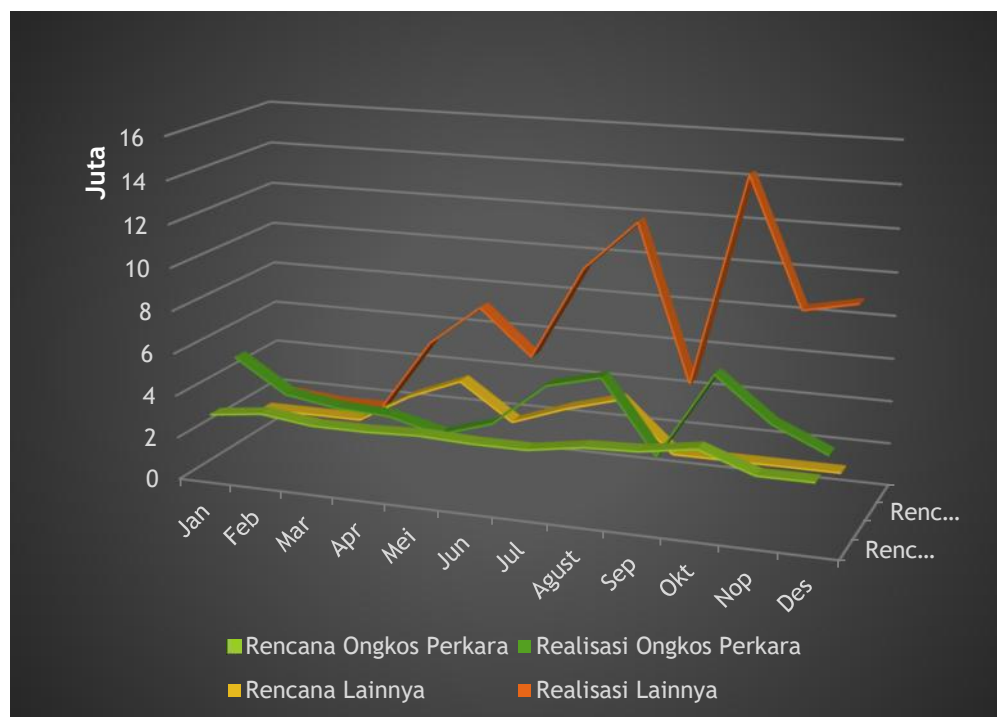
KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No.	Bulan	RENCANA PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-



KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	Ongkos Perkara		Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	Januari	3.000.000	5.070.000	1.800.000	1.892.000
2	Februari	3.300.000	3.510.000	1.800.000	1.647.300
3	Maret	3.000.000	3.120.000	1.800.000	1.664.300
4	April	3.000.000	3.000.000	3.200.000	5.141.000
5	Mei	3.100.000	2.390.000	4.200.000	7.111.000
6	Juni	3.000.000	3.180.000	2.500.000	4.955.500
7	Juli	3.000.000	5.210.000	3.400.000	9.438.500
8	Agustus	3.400.000	5.840.000	4.100.000	11.790.000
9	September	3.500.000	2.490.000	1.800.000	4.415.000
10	Oktober	3.900.000	6.480.000	1.800.000	14.316.000
11	November	3.000.000	4.520.000	1.800.000	8.344.000
12	Desember	3.000.000	3400000	1.800.000	8863500



DAFTAR REVISI DIPA

Data revisi DIPA Pengadilan Agama Ambarawa tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (005.01)

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1.	Revisi POK	07-02-2019
2.	Revisi Halaman III	29-03-2019
3.	Perubahan Halaman IV	30-04-2019
4.	Perubahan Halaman IV	29-05-2019
5.	Revisi Halaman III	27-06-2019
6.	Perubahan Halaman IV	25-07-2019
7.	Penambahan Pagu Anggaran	19-08-2019
8.	Revisi POK	09-09-2019
9.	Perubahan Halaman III	23-09-2019
10.	Penambahan Pagu Anggaran	05-11-2019
11.	Perubahan Pejabat Pengelola DIPA	18-11-2019
12.	Pergeseran Antar Keluaran Antar Satker	23-12-2019

DIPA BADAN PERADILAN AGAMA (005.04)

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1.	o Revisi Halaman III o Pergeseran Anggaran Antar Keluaran	29-03-2019
2.	Revisi Halaman III	27-06-2019
3.	Revisi Halaman III	09-09-2019